



**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (SIM LPPD)
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Management Information System on Regional Local Government Register (SIM
LPPD) Regency of Banyuwangi*

SKRIPSI

Oleh

**Pradita Hakiki Arianda
NIM 120910201082**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (SIM LPPD)
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Management Information System on Regional Local Government Register (SIM
LPPD) Regency of Banyuwangi*

SKRIPSI

Oleh

**Pradita Hakiki Arianda
NIM 1209010201082**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Almarhum Ayahanda Agus Murtiyanto, Ibunda Suliana dan Adik Salsabila Keke Mauliyana yang tercinta;
2. Teruntuk Guru Ngaji, Guru di TK Sebelas Maret, SDN Garahan I dan III, SMPN 1 Silo, dan SMKN 4 Jember, serta Dosen di Universitas Jember;
3. Sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam setiap proses perjuangan;
4. Yang terhormat kedua Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., dan Drs. Agus Suharsono, M.Si.
5. Almamater tercinta, Progam Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

“Menyepi itu penting, supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian”

(Emha Ainun Najib)¹

“Jangan kerdilkan Dirimu dengan takabur. Jangan sempitkan dadamu dengan dengki. Dan jangan keruhkan pikiranmu dengan amarah”

(KH. A. Mustofa Bisri)²

¹ Najib, Emha Ainun. 2012. Markesot Bertutur. Bandung: Mizan Publisher

² <https://www.brilio.net/> (Diakses 16 Januari 2017 Pukul 20.00 WIB)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pradita Hakiki Arianda

NIM : 120910201082

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Maret 2017

Yang menyatakan

Pradita Hakiki Arianda

NIM 120910201082

SKRIPSI

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (SIM LPPD)
KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh

Pradita Hakiki Arianda

NIM 120910201082

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Agus Suharsono, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Sistem Informasi Manajemen pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari, Tanggal : Senin, 3 April 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si
NIP 195607261989021001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP 195805101987022001

Anggota Tim Penguji

1. Drs. Agus Suharsono, M.Si ()
NIP 196308141989031023
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si ()
NIP 197003221995122001
3. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA ()
NIP 197903032005011001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardianto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Sistem Informasi Manajemen pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi; Pradita Hakiki Arianda, 120910201082; 2017; 137 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Negara Indonesia terdiri dari 5 tingkat administrasi yaitu Negara, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Untuk meningkatkan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih efektif dan efisien karena kebutuhan masyarakat yang meningkat sehingga dibutuhkan sistem manajemen yang terintegrasi dengan sistem informasi yang diaplikasikan dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen (SIM) salah satunya di kabupaten Banyuwangi ialah Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD). Namun meskipun kabupaten Banyuwangi telah memiliki sistem LPPD yang terintegrasi dengan teknologi informasi, pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah diantaranya masih banyaknya data terkait LPPD yang masih belum diisi sehingga terklasifikasi dalam data Tidak Diisi (TDI).

Berdasarkan masalah tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui bagaimanakah penerapan SIM LPPD secara mendalam dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif pada pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan SIM LPPD. Peneliti menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian bertempat di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan melakukan wawancara terhadap informan yang didukung dengan dokumen-dokumen LPPD, serta halaman aplikasi SIM LPPD. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan aktivitas Sistem Informasi (Nugroho, 2008:17) yaitu input, proses, dan output yang kemudian akan dianalisis dengan komponen Sistem Informal, Komponen Sistem Formal, Komponen Sistem Komputer Formal dan Komponen Sistem Komputer Informal yang berhubungan

dengan fungsi *structured decision system* dan *decision support system* dalam penerapan SIM LPPD dengan 3 tahapan analisis interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan dari 4 komponen SIM LPPD, semua komponen sudah diterapkan yaitu Komponen sistem informal, Komponen sistem formal, Komponen sistem formal, serta komponen sistem informal. Namun pada penerapannya masih terdapat banyak sekali masalah seperti pada komponen sistem informal yang terletak pada kurang maksimalnya penggunaan aplikasi *SMS Gateway*. Pada komponen sistem formal masih banyak data yang terklasifikasi tidak diisi (TDI) karena kurang tanggapnya penyusun LPPD pada SKPD dalam melakukan entri data LPPD serta kurangnya pengawasan dari *top management*. Pada komponen komputer formal terdapat gangguan trafic online dan pada Komponen komputer informal masih terdapat kurangnya koordinasi antara penyusun LPPD Kabupaten dan SKPD dalam penyediaan informasi pada submenu Narasi.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardianto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edi Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran untuk peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Drs. Agus Suharsono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama peneliti berstatus sebagai Mahasiswa.
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember yang memberi ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah.
8. Untuk Pak Oik, Pak Gusdur, Mas Prima, Mas Ndaru, Bu Nur, Bu Mun, serta seluruh Pegawai Bagian Pemerintahan Sekretariat yang telah membantu dan

mendukung kelancaran penulisan skripsi ini dan pihak BKD Kabupaten Banyuwangi serta Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi yang telah mengizinkan, membantu, dan menyempatkan waktunya untuk menemani sekaligus menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.

9. Keluargaku, Almarhum Ayahanda tercinta Agus Murtiyanto dan Ibunda tercinta Suliana, serta adikku Salsabila Keke Mauliyana yang selalu memberikan dukungan dan doa agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat setia saya Putra, Toro, Fajri, Rifki, Bayu, Yoshi, Irwan, Zulfi, Bram, Yudha, Rian, Diar, Adit yang luar biasa mendukung dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman seperjuangan mahasiswa Administrasi Negara angkatan tahun 2012 selama ini memberikan coretan kisah dalam catatan perjalanan hidup penulis dengan berbagai dinamika perjuangan yang terjadi selama kuliah.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 6 Maret 2017

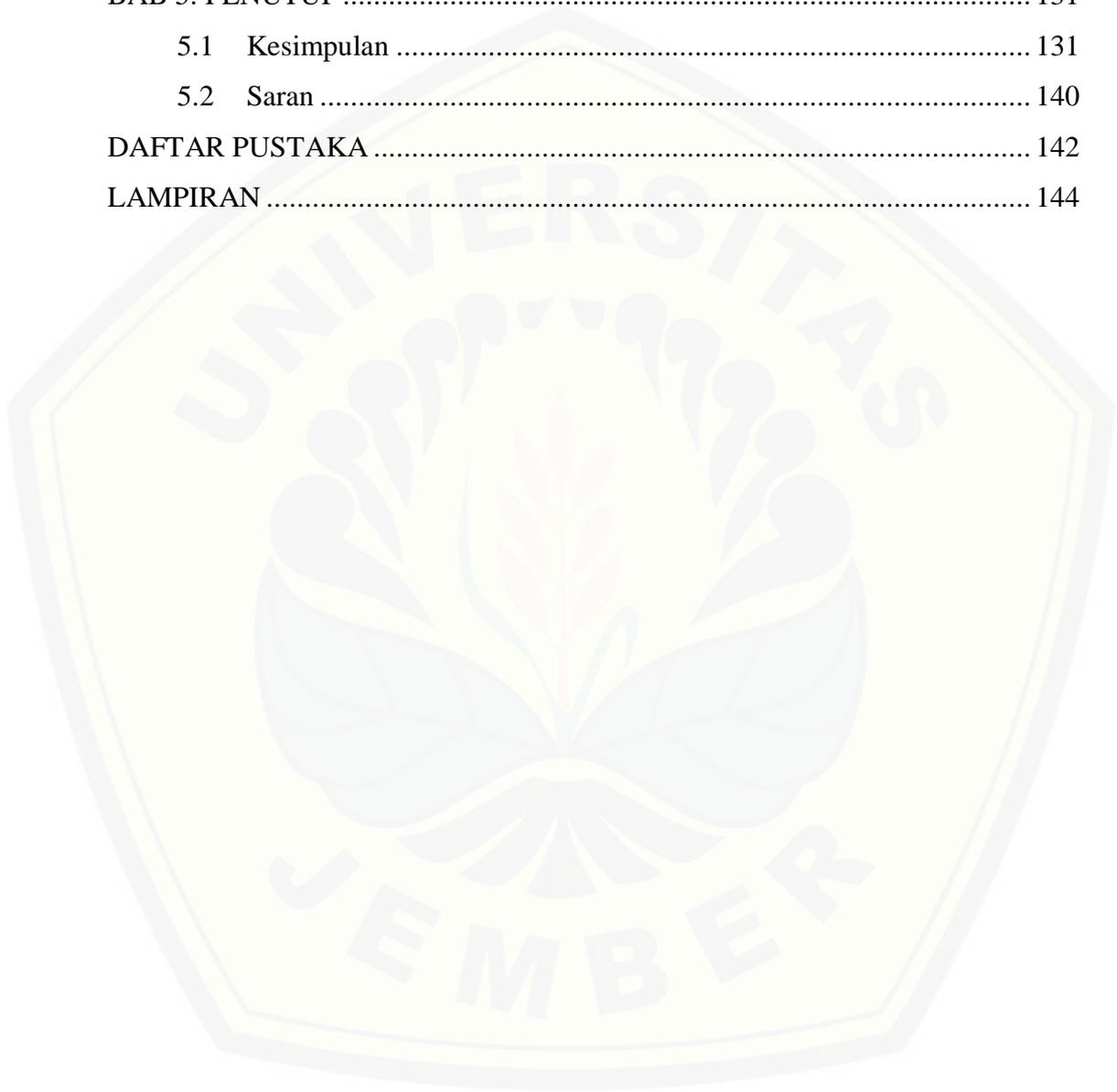
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Dasar	12
2.2 Administrasi Publik	13
2.2.1 Pengertian Administrasi Publik	13
2.2.2 Perkembangan Paradigma Administrasi Publik	14
2.3 <i>Good Governance</i>	15
2.3.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	15
2.3.2 Prinsip – Prinsip <i>Good Governance</i>	16
2.4 Konsep Otonomi Daerah	18
2.4.1 Pengertian Otonomi Daerah	18
2.4.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	19

2.4.3	Asas – Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	20
2.5	<i>E-Government</i>	22
2.6	Sistem Informasi Manajemen.....	25
2.6.1	Sistem Informasi	26
2.6.2	Manajemen.....	30
2.6.3	Sistem Informasi Manajemen Organisasi Publik.....	31
2.6.4	Faktor-faktor Keberhasilan Sistem Informasi Manajemen.....	34
2.7	Kerangka Berpikir	35
BAB 3.	METODE PENELITIAN.....	38
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.3	Data dan Sumber Data	41
3.4	Penentuan Informan Penelitian	42
3.5	Teknik dan Alat Perolehan Data.....	45
3.6	Teknik Menguji Keabsahan Data	47
3.7	Teknik Penyajian Data dan Analisis Data.....	48
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1	Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	51
4.2	Gambaran Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	52
4.3	Penyajian Data Penelitian	57
4.3.1	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Banyuwangi.....	57
4.3.2	Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi	69
4.3.3	Jenis Informasi LPPD yang tersedia dalam SIM LPPD.....	103
4.3.4	Media Penerapan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	108
4.3.5	Bentuk Penyajian Informasi Pada Setiap Pengguna	110
4.4	Analisis Data Penelitian	121

4.4.1	Komponen Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi	121
4.5	Verifikasi Hasil Penelitian	135
BAB 5.	PENUTUP	131
5.1	Kesimpulan	131
5.2	Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN	144



DAFTAR TABEL

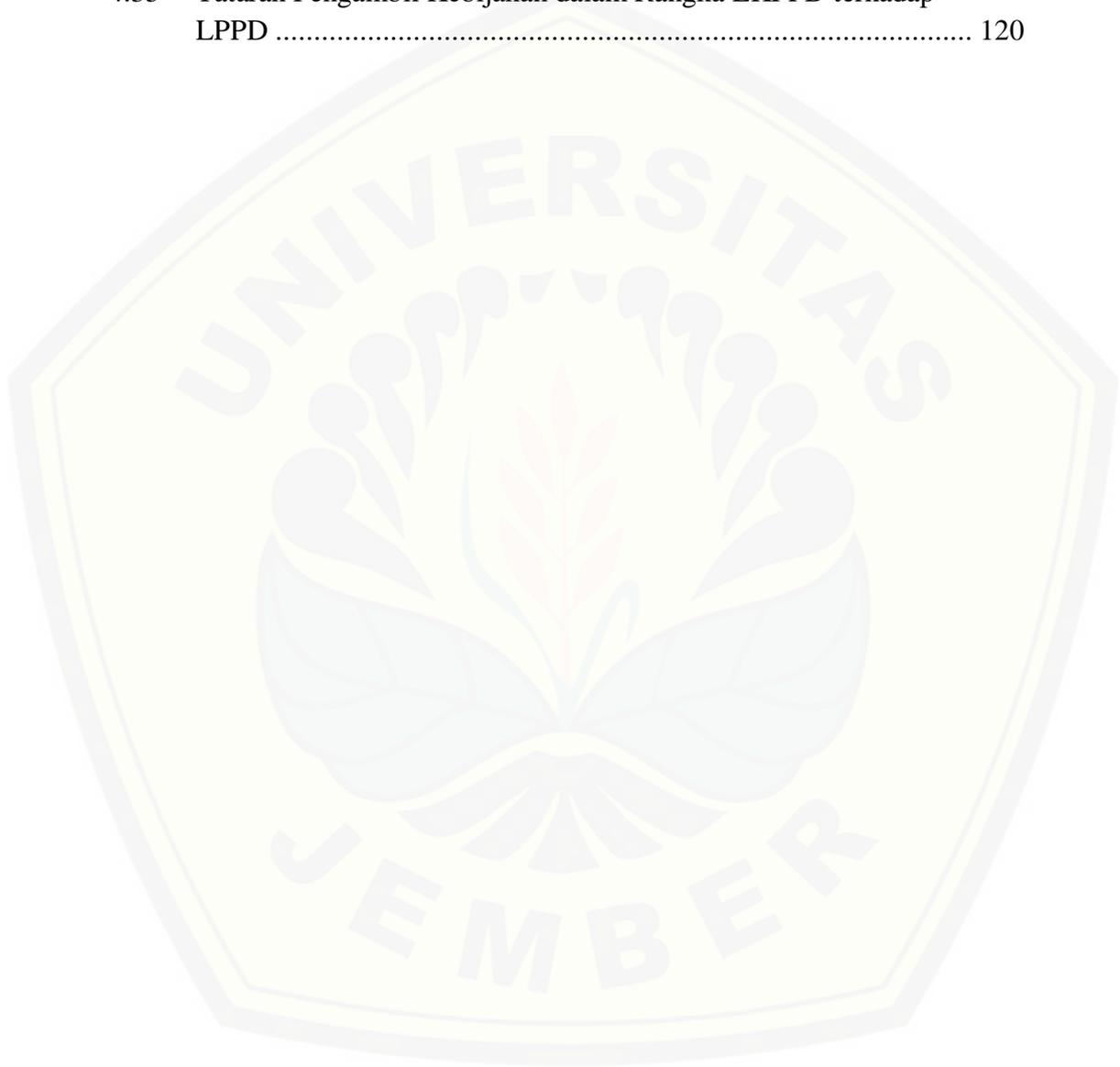
	Halaman
1.1 Pemeringkatan <i>E-Government</i> Indonesia (PeGI) tahun 2015.....	3
1.2 SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	5
1.3 Daftar Peringkat LPPD berdasarkan EKPPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2009-2014.....	8
1.4 Daftar data TDI LPPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015.....	9
1.5 Daftar SKPD yang paling banyak terklasifikasi TDI.....	10
3.1 Waktu Penelitian	40
3.2 Tabel Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	47
4.1 Peringkat LPPD terhadap EKPPD kategori Kabupaten tingkat Nasional tahun 2016	68
4.2 User Role SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi	72
4.3 Hasil Analisa Komponen Sistem Informal, Komponen Sistem Formal	136
4.4 Hasil analisa Komponen Sistem Komputer Formal, dan Komponen Sistem Komputer Informal.....	137

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Bagan alur pelaksanaan LPPD Kabupaten Banyuwangi.....	6
2.1 Interaksi dalam <i>E-Gov</i>	23
2.2 Informasi dan SIM untuk semua tingkat manajemen.....	26
2.3 Aktivitas sistem informasi	27
2.4 Komponen Sistem Informasi	28
2.5 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian	37
3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman.....	50
4.1 Rancangan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	74
4.2 Menu Data Dasar, submenu Program Nasional Urusan Wajib SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi.....	76
4.3 Menu Narasi, submenu Narasi Bab IV Tugas Pembantuan SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi.....	77
4.4 Menu Narasi, Submenu BAB I Pendahuluan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Banyuwangi	77
4.5 Aspek Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah. IKK III.1 LPPD.....	80
4.6 Entri data IKK III.1 BKD Kabupaten Banyuwangi	81
4.7 Lampiran IKK III.1 BKD Kabupaten Banyuwangi	82
4.8 IKK III.2 BKD Kabupaten Banyuwangi	84
4.9 IKK III.2 Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi	85
4.10 Entri IKK III.2 BKD Kabupaten Banyuwangi.....	86
4.11 IKK III.2 BKD Kabupaten Banyuwangi	87

4.12	IKK III.2 Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi	88
4.13	Aspek Pekerjaan Umum, IKK III.3 LPPD Kabupaten Banyuwangi	92
4.14	Entri IKK III.3 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	93
4.15	Lampiran III.3 Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi	94
4.16	Submenu kirim SMS <i>Gateway</i> SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi	96
4.17	Daftar SMS terkirim SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi.....	97
4.18	Daftar SMS masuk SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi	98
4.19	Menu ILPPD SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi	101
4.20	Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD)	102
4.21	Submenu Narasi, Bab III Urusan Desentralisasi, Program dan Kegiatan Urusan Kabupaten Banyuwangi.....	111
4.22	Submenu Lampiran III.1 LPPD Kabupaten Banyuwangi	111
4.23	Lampiran III.2 LPPD Kabupaten Banyuwangi.....	112
4.24	Lampiran III.3 LPPD Kabupaten Banyuwangi.....	112
4.25	Submenu Narasi, Bab III Urusan Desentralisasi, Program dan Kegiatan Urusan Kabupaten Banyuwangi	114
4.26	Lampiran III.1 LPPD Kabupaten Banyuwangi.....	114
4.27	Lampiran III.2 LPPD Kabupaten Banyuwangi.....	115
4.28	Lampiran III.3 LPPD Kabupaten Banyuwangi.....	115
4.29	Submenu Narasi, Bab IV Tugas Pembantuan Kabupaten Banyuwangi	116
4.30	Lampiran III.1 LPPD Kabupaten Banyuwangi.....	116
4.31	Lampiran III.2 LPPD Kabupaten Banyuwangi.....	117
4.32	Lampiran III.3 LPPD Kabupaten Banyuwangi.....	118

4.33	Submenu Setting, Daftar User SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi	119
4.34	Tataran Pengambil Kebijakan dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD	119
4.35	Tataran Pengambil Kebijakan dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD	120



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki aspirasi dan cara pandang yang berbeda-beda. Kemajemukan masyarakat Indonesia tersebut perlu di akomodasi secara kelembagaan dengan pemberian otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, terciptalah pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan yang bertingkat dari pemerintahan Provinsi hingga pemerintahan Desa/Kelurahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tingkatan administrasi pemerintahan negara Indonesia tersebut Menurut Samodra Wibawa (2005:199), terdiri dari 5 tingkat administrasi yaitu Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

Untuk meningkatkan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih efektif dan efisien karena kebutuhan masyarakat yang meningkat sehingga dibutuhkan sistem manajemen yang terintegrasi dengan sistem informasi yang diaplikasikan dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen (SIM). Secara umum, keberadaan SIM mendukung peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas organisasi pemerintah dan dunia usaha. Menurut Eko Nugroho (2008:16) bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi mengelola informasi bagi manajemen organisasi. Selain itu informasi yang dihasilkan dari berbagai cara pengelolaan data melalui SIM tersebut diperuntukan bagi keperluan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam organisasi.

Sistem Informasi Manajemen pada organisasi pemerintah diimplemetasikan dalam bentuk *E-Government (E-Gov)*. Menurut World Bank yang dikutip oleh Eko Nugroho (2008:165) bahwa istilah *E-Gov* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan.

Penerapan *E-Gov* di Indonesia telah dilaksanakan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pada instruksi tersebut disebutkan bahwa pemerintah harus segera mengimplementasikan *E-Government* agar dapat memanfaatkan teknologi untuk menghapus birokrasi, terciptanya transparansi, serta memudahkan pengaksesan informasi bagi instansi-instansi pemerintah dengan sistem yang terintegrasi yang nantinya diharapkan untuk seluruh elemen baik negara, masyarakat, maupun dunia usaha dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah kapanpun dan dimanapun.

Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, lebih lanjut pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 mengeluarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi yang mengatur terkait penggunaan SIM dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Menindaklanjuti dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang SIMDA tersebut dan dalam upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan, sekaligus untuk memenuhi amanat PP No. 3 tahun 2007 pasal 14 ayat 2 dimana Pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi LPPD yang merupakan subsistem dari sistem informasi LPPD yang dibangun oleh Pemerintah, pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan *E-Gov* pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang kemudian melahirkan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD).

SIM LPPD ini merupakan salah satu dari sekian banyak *E-Gov* yang diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang keseluruhannya terintegrasi dalam domain situs web resmi milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu <http://www.banyuwangi.kab.go.id> yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188/126/KEP429.012/2007 tentang Penggunaan Nama Domain Situs Web Resmi Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mengharuskan semua

dinas/instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus membangun web yang terintegrasi dengan domain web resmi Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGI) tahun 2015 pelaksanaan *E-Gov* di Kabupaten Banyuwangi sudah termasuk dalam kategori Baik, Berikut hasil pemeringkatan PeGI 2015:

Tabel 1.1 Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Nilai Rata-rata	Kategori
1	Kota Surabaya	3.63	Sangat Baik
2	Kota Malang	3.32	Baik
3	Kabupaten Bojonegoro	3.15	Baik
4	Kabupaten Lamongan	3.13	Baik
5	Kabupaten Gresik	2.87	Baik
6	Kabupaten Banyuwangi	2.82	Baik
7	Kota Pasuruan	2.69	Baik
8	Kabupaten Sidoarjo	2.68	Baik
9	Kota Probolinggo	2.63	Baik
10	Kabupaten Malang	2.62	Baik
	Rata-rata	3.0	Baik

Sumber : Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) Direktorat E-Government, KEMKOMINFO RI, tahun 2016.

Dalam PeGI tersebut Kabupaten Banyuwangi menduduki peringkat 6 dalam pengembangan *E-Government* di segala sektor dengan nilai rata-rata 2.82, masih terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan kota Surabaya dengan nilai rata-rata 3.63. Nilai rata-rata didapat berdasarkan rata-rata nilai pada kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan *E-Government*, Kelembagaan, Infrastruktur pendukung *E-Government*, Aplikasi pendukung *E-Government*, serta perencanaan *E-Government*.

Dalam melaksanakan SIM LPPD ini, merupakan bagian dalam upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan fungsi *E-Government* dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat, LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah yang berdasarkan pada pasal 9 ayat (4) PP No. 3 tahun 2007 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ruang lingkup urusan daerah yang terdapat dalam LPPD terdiri dari 3 urusan antara lain :

1. Urusan Desentralisasi, sebagaimana yang telah ditentukan urusan Desentralisasi terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
2. Tugas Pembantuan, sebagaimana yang telah ditentukan tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah; tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah Provinsi; tugas pembantuan kepada Desa.
3. Tugas Umum Pemerintahan.

Sumber informasi LPPD difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan IKK (Indeks Kunci Kinerja). IKK merupakan kesatuan dalam sistem pengukuran kinerja dari masing-masing SKPD, Pemerintah Daerah, antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam tingkat wilayah provinsi maupun pada tingkat nasional. IKK berisi data capaian kinerja yang diisi oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui tim penilai. Kabupaten Banyuwangi tercatat terdapat 93 SKPD yang terbagi dalam 10 jenis SKPD, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Jumlah SKPD
1.	Badan Pemerintah Daerah	9
2.	Bagian Sekretariat Pemerintah Daerah	9
3.	Dinas Pemerintah Daerah	16
4.	Inspektorat Pemerintah Daerah	1
5.	Kantor Pemerintah Daerah	2
6.	Kecamatan	23
7.	Kelurahan	28
8.	Rumah Sakit Umum Daerah	2
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	1
10.	Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi	1
	Jumlah	93

Sumber : LPPD 2015 Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016.

LPPD merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hierarkis antara pemerintah dan daerah, sehingga kegiatan Pemerintah Daerah tetap menjadi rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Oleh karena itu pengaturan mengenai pelaporan tidak hanya dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, tetapi sekaligus juga mengatur laporan dalam rangka desentralisasi dan tugas pembantuan, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangannya sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan bahan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah.

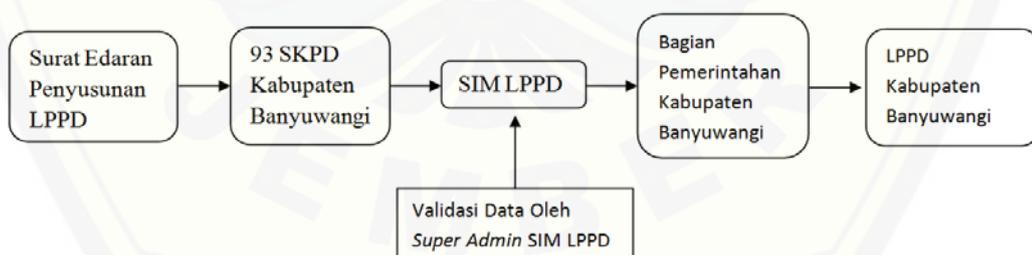
Kedudukan LPPD sangat penting bagi terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemerintah, maka dari itu SIM LPPD ini perlu diterapkan sebagai bagian dari inovasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada Pemerintah. SIM LPPD ini merupakan suatu piranti lunak sistem komputerisasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dirancang khusus untuk mempermudah penyajian pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara umum sistem ini menghasilkan laporan tabel dan narasi pelaksanaan urusan, program dan kegiatan desentralisasi. Tujuan dan kegunaan sistem ini adalah untuk memudahkan dan mempercepat pelaporan LPPD dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dapat diakses langsung publik. sebagai wujud keterbukaan informasi dan bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap publik dalam

penyelenggaraan kinerja dan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan keterangan *Super Administrator* SIM LPPD pada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, dengan dibangunnya sistem ini berbagai keuntungan didapat, yaitu:

1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat
2. Laporan dalam format *word* dan *excel* (tabel)
3. Dapat mempercepat *update* pelaporan
4. Dapat dioperasikan banyak admin (*multi user*)
5. Mudah untuk digunakan

Didalam SIM LPPD terdapat beberapa tahap yang merupakan bagian dari proses penyusunan LPPD Kabupaten Banyuwangi yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas terhadap pemerintah dan masyarakat. Berikut ini merupakan bagan yang menunjukkan seperti apa tahap-tahap dalam pelaksanaan LPPD yang didalam tahap-tahap tersebut SIM LPPD menjadi bagian penting sehingga melahirkan output LPPD Kabupaten Banyuwangi yang Peneliti olah berdasarkan Buku Manual SIM LPPD tahun 2012 oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan alur pelaksanaan LPPD Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016. (Sumber : Buku Manual SIM LPPD Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Bagan diatas merupakan alur pelaksanaan LPPD Kabupaten Banyuwangi yang dimana SIM LPPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan LPPD. Berdasarkan Buku Manual SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi, penyusunan LPPD dimulai pada Tanggal 31 Desember dimana merupakan masa

akhir tahun anggaran, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengedarkan surat edaran berupa himbauan kepada seluruh Kepala SKPD untuk menyusun LPPD SKPD. Kemudian SKPD melakukan pengumpulan data terkait dengan hal-hal yang akan dilaporkan dalam LPPD SKPD dan kemudian *User Peng-entry* melakukan tugasnya yaitu *entri* data ke dalam laman *web* SIM LPPD. Setelah dilakukan *Entry* data oleh *User Peng-entry* yang merupakan *user* masing-masing SKPD. Kemudian dilakukan pengecekan oleh *Super Administrator* yang berada pada Bagian Pemerintahan untuk memastikan seluruh data telah terpenuhi semua. Jika tidak terpenuhi, data akan diklasifikasikan sebagai data TDI (tidak diisi) yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan menghubungi SKPD terkait untuk menghimbau data yang TDI tersebut untuk segera diisi. Setelah semua selesai maka tim penyusun LPPD yaitu Bagian Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi mulai melakukan penyusunan LPPD yang akan diserahkan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri.

Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan sistem konvensional yang digunakan dalam pelaksanaan LPPD Kabupaten Banyuwangi sebelumnya, dimana proses pelaporan LPPD melalui SKPD kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melalui bagian Pemerintahan dilakukan secara manual, yang artinya setiap SKPD harus menggunakan laporan dalam bentuk lembaran-lembaran yang terdiri dari suplemen data yang dibutuhkan dalam LPPD Kabupaten Banyuwangi, dimana hal ini menurut bapak Prima selaku penyusun LPPD Kabupaten Banyuwangi sangat memakan banyak waktu dan kurang efektif sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyerahan data oleh SKPD kepada Bagian Pemerintahan, hal ini juga berpengaruh terhadap keterlambatan penyerahan LPPD oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kemudian akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri yang kemudian akan dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang merupakan evaluasi kinerja pemerintah berdasarkan LPPD pada daerah otonomi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan peneringkatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), peringkat LPPD kabupaten Banyuwangi

mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah digunakannya SIM LPPD ini, Berikut peringkat EKPPD Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 1.3 Daftar Peringkat LPPD berdasarkan EKPPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2009-2014

No.	Tahun LPPD	Tahun EKPPD	Peringkat
1.	2009	2011	85
2.	2010	2012	161
3.	2011	2013	26
4.	2012	2014	16
5.	2013	2014	39
6.	2014	2016	20

Sumber : Diolah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tahun 2016.

Data peringkat EKPPD diatas menunjukkan bahwa SIM LPPD cukup berpengaruh secara signifikan dalam penyelenggaraan LPPD, dimana pada tahun 2011 saat digunakannya SIM LPPD, peringkat LPPD Kabupaten Banyuwangi berada pada peringkat 26 yang sebelumnya pada tahun 2010 dan tahun 2009 sebelum digunakannya SIM LPPD ini berada pada peringkat 161 dan 85. Karena berdasarkan keterangan *Super Administrator/Super Admin* dengan digunakannya SIM LPPD data yang tidak diisi (TDI) dapat terpantau sehingga sebelum dilakukan penyusunan LPPD data yang TDI tersebut dapat dilengkapi terlebih dahulu.

Namun pada pemeringkatan EKPPD tahun 2013, peringkat LPPD Kabupaten Banyuwangi turun menjadi 39. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor-faktor yang terkait langsung dengan pelaksanaan LPPD maupun tidak terkait secara langsung dalam pelaksanaan LPPD. Berdasarkan keterangan *Super Administrator/Super Admin* SIM LPPD yaitu bapak Prima Kharisma Jabara, salah satu penyebab yang menyebabkan pada tahun 2013 pelaksanaan LPPD tidak maksimal karena Kabupaten Banyuwangi terpecah fokus dalam persiapan pilkada karena berkaitan dengan calon *Petahana* sehingga kontrol Kepala Daerah menjadi berkurang yang diikuti dengan kurangnya atusias SKPD terhadap pelaksanaan LPPD. Selain itu, terkait dengan pelaksanaan pilkada, bapak Prima diperbantukan pada Panwaslu Kabupaten Banyuwagi dan untuk sementara *Super*

Admin diperbantukan pada rekan kerja Bapak Prima yaitu Bapak Ndaru yang sebelumnya belum berpengalaman dalam pelaksanaan SIM LPPD. Hal ini menunjukkan terdapat permasalahan dalam kurangnya dukungan secara struktural dan kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SIM LPPD. Namun pada EKPPD tahun 2016 berdasarkan LPPD tahun 2014 menjadi membaik yaitu pada peringkat 20 karena Penyusun LPPD Kabupaten sudah kembali bekerja sesuai dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan LPPD yang menjadikan pelaksanaan SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi ini tidak dapat berjalan maksimal. Berikut keterangan yang diberikan Penyusun LPPD Kabupaten Banyuwangi yang juga merupakan *Super Administrator/Super Admin* SIM LPPD yaitu bapak Prima Kharisma Jabara pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi saat dilakukan wawancara oleh peneliti, tanggal 8 Maret 2016 :

“...rendahnya antusiasme SKPD dalam penyusunan LPPD menggunakan SIM LPPD karena SKPD menganggap penyusunan LPPD hanya formalitas saja dan juga belum ada *phunishmen* atau sanksi yang akan diterima SKPD jika tidak mengerjakan LPPD, sehingga data yang dihimpun oleh *Super Administrator/Super Admin* hanya sekedar data yang diinput seadanya dan menyebabkan terdapat data yang TDI (Tidak di isi)...”

Berikut ini adalah daftar data TDI yang dihimpun selama pelaksanaan SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi :

Tabel 1.4 Daftar data TDI LPPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015

No.	Tahun LPPD	Jumlah SKPD	Data Tidak diisi (TDI)	Jumlah Jenis Data	Presentase
1.	2011	26	242	2940	8.23%
2.	2012	6	8	2940	0.27%
3.	2013	2	2	2940	0.06%
4.	2014	31	145	2940	4.93%
5.	2015	42	57	2940	1.93%

Sumber : Diolah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016.

Data diatas menunjukkan data TDI yang terdaftar selama pelaksanaan SIM LPPD, dimana SIM LPPD pertama digunakan pada tahun 2012 dengan

pengerjaan LPPD tahun 2011. Pada data tersebut masih terdapat data yang tidak diisi (TDI). Meskipun persentasenya masih relatif kecil dengan rata-rata berada di bawah 10 %, hal tersebut menunjukkan bahwa kurang antusiasnya SKPD dalam melakukan penyusunan LPPD. Sehingga data yang di-*entri* ke dalam *server* SIM LPPD tidak maksimal. Presentase TDI tertinggi terjadi pada tahun 2011 dimana mencapai 8.23% dari total 2940 jenis data yang seharusnya di-*entri* ke dalam *server* SIM LPPD, namun presentase TDI terendah terjadi pada pengerjaan LPPD tahun 2013 yang dikerjakan pada tahun 2014 yaitu sebesar 0.06%. Namun, mengalami kenaikan presentase TDI kembali pada LPPD tahun 2014 dan 2015 dengan presentase 4.93% dan 1,93%. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dalam pelaksanaan SIM LPPD sehingga data yang di-*entri* ke dalam *server* SIM LPPD menjadi kurang maksimal kemudian menyebabkan data mejadi TDI.

Dari data TDI tersebut yang penulis olah berdasarkan LPPD tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015, penulis ambil 10 SKPD yang paling banyak terklasifikasi TDI selama melakukan pengentrian data dimana SKPD tersebut terdiri sebagai berikut, yaitu :

Tabel 1.5 Daftar SKPD yang Paling Banyak Terklasifikasi TDI

No.	Nama SKPD	Data TDI berdasarkan Tahun LPPD					Total
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Bagian Organisasi	-	-	-	25	25	50
2.	Bagian Perekonomian	-	-	-	1	25	26
3.	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	5	-	-	19	19	43
4.	Dinas PU Pengairan	72	22	-	23	25	142
5.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	4	-	-	-	39	43
6.	Kecamatan Srono	21	-	-	1	8	30
7.	Kelurahan Sobo	2	-	-	-	6	9
8.	Rumah Sakit Umum Daerah Genteng	-	-	-	6	3	9
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	-	1	-	6	2	9
10.	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	57	57

Sumber : Diolah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016.

Pada tabel diatas tersebut dapat diketahui terdapat 10 SKPD yang penulis ambil, dimana 10 SKPD tersebut merupakan SKPD yang paling banyak

terklasifikasi TDI dalam melakukan entri data dalam pelaksanaan LPPD selama kurun waktu tahun 2011 sampai 2015. Pada data TDI tersebut merupakan data yang seharusnya diisi pada Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK paling banyak terklasifikasi TDI ialah pada IKK III.2, dimana pada form ini suplemen data berasal dari keseluruhan SKPD. Pada keseluruhan data TDI tersebut yang berasal dari 10 SKPD tersebut sebanyak 418 data TDI dari 454 total data TDI dari seluruh SKPD yang tidak mengisi form isian. Hal ini dapat diartikan bahwa dari ke-10 SKPD tersebut, data TDI mencapai 92.07% dari keseluruhan data TDI. Dinas PU Pengairan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Banyuwangi menempati urutan pertama dalam penyumbang data TDI terbanyak selama kurun waktu 5 tahun dalam pelaksanaan LPPD yaitu mencapai 142 data TDI, yang diikuti oleh sekretariat DPRD, Bagian Organisasi dan seterusnya.

Disamping terdapat SKPD yang terindikasi tidak baik dalam melaksanakan LPPD, terdapat 21 SKPD yang terindikasi baik dalam pelaksanaan LPPD, dimana selama kurun waktu 5 tahun yang terdiri dari tahun 2011 hingga 2015 SKPD ini selalu penuh dalam melakukan pengisian data sehingga membantu penyusun LPPD Kabupaten dalam percepatan penyusunan LPPD. SKPD tersebut ialah, Badan Kepegawaian dan Diklat; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan; Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; Kantor Ketahanan Pangan; Kecamatan Giri; Kecamatan Glagah; Kecamatan Muncar; Kecamatan Rogojampi; Kecamatan Tegalsari; Kelurahan Bakungan; Kelurahan Banjarsari; Kelurahan Bulusan; Kelurahan Giri; Kelurahan Gombengsari; Kelurahan Mojopagung; Kelurahan Penataban; Kelurahan Penganjuran; Kelurahan Temenggungan.

Setelah diterapkannya sistem ini, peringkat LPPD Kabupaten Banyuwangi menjadi meningkat signifikan namun secara berkala peringkat LPPD berdasarkan EKPPD Banyuwangi tidak pernah masuk 10 besar hal ini juga ditambah dengan permasalahan dimana meski Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki Sistem Informasi Manajemen yang berbasis komputer dalam pelaksanaan LPPD, masih terdapat data yang tidak diisi (TDI) yang menyebabkan pelaksanaan LPPD

menjadi tidak maksimal. Hal ini yang menjadi menarik bagi peneliti untuk meneliti pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi karena peneliti merasa ada sesuatu yang menggugah peneliti untuk melihat lebih dalam terkait penerapan SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Pada umumnya pengertian dari rumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahan masalahnya. Menurut Sugiyono (2001:35), rumusan masalah berbeda halnya dengan masalah. Jika masalah didefinisikan sebagai bentuk kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan sesuatu kenyataan (*das sein*) maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berangkat dari definisi diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Penerapan SIM LPPD di Kabupaten Banyuwangi?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) tujuan penelitian menyampaikan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan pengertian tersebut dan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan daripada diadakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dibuat hendaknya memiliki manfaat kepada lingkungan sekitar terkait objek dan bahasan penelitiannya. Kata lainnya, manfaat penelitian akan diperoleh jika tujuan dari penelitian tercapai. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) menjelaskan bahwa manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik itu untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas.

Berdasarkan definisi diatas tersebut, beserta rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Bagi Dunia Akademis, peneliti berharap dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara, Khususnya terkait pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam pengembangan ilmu Administrasi Negara
- b. Bagi Pemerintah, manfaat praktis yang diharapkan bagi pembuatan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian ini adalah penulisan laporan penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan masukan positif dalam pengembangan SIM LPPD dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- c. Bagi Masyarakat Luas, Manfaat yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas terkait bagaimana pelaksanaan SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah dukungan dasar teoritis sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. Tinjauan pustaka merupakan bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel, atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya. Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22), menyebutkan bahwa tinjauan pustaka memuat kajian teori dan konsep dasar yang berkaitan dengan masalah penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti serta kerangka berpikir yang dibangun dari teori dan konsep dalam tinjauan pustaka.

2.1 Konsep Dasar

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Menurut Silalahi (2012:112), konsep adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Dari definisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa konsep dasar yang dibangun oleh seorang peneliti terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yang kemudian akan membentuk suatu susunan sistematis dalam kerangka konsep penelitian. Berdasarkan definisi tentang konsep dasar tersebut, peneliti mencoba merangkai konsep dasar penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Administrasi Publik
- b. *Good Governance*
- c. Konsep Otonomi Daerah
- d. *E-Government*
- e. Sistem Informasi Manajemen

Beberapa konsep dasar tersebut diharapkan mampu membentuk kerangka berpikir peneliti yang kemudian dapat mempermudah peneliti untuk menemukan jawaban atas suatu penelitian yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, beberapa

konsep tersebut menjadi gambaran umum bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi.

2.2 Administrasi Publik

2.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Menurut Trecker yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991:10) bahwa administrasi merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerja sama. Menurut A Dunrise yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991:9) menunjukkan beberapa batasan tentang “administrasi”. Administrasi menurut A Dunrise, diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan kebijakan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai kegiatan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis.

Menurut Chandler dan Plano (1988: 29), Administrasi Publik adalah dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang ini juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

McCurdy (1986) dalam survey literturnya mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain bahwa administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan administratif tetapi juga persoalan politik. Makna administrasi publik sangatlah bervariasi, bahkan ada

yang mempresepsikan “*administration of public*”, ada yang mengatakan “*administratioan for public*” bahkan ada yang mengatakan “*administration by public*”.

2.2.2 Perkembangan Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai dan metode-metode, prinsip dasar, ataupun cara memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada kurun waktu tertentu (Khun,1970). Dalam ilmu administrasi publik paradigma terjadi berulang kali, namun demikian perubahan tersebut tidak berarti menghapuskan secara keseluruhan paradigma yang berlaku sebelumnya, tapi akan tetap berlaku sesuai dengan cara pandang, nilai-nilai atau metode-metode yang dianut oleh masyarakat tertentu. Menurut Keban (2008:31) paradigma administrasi publik dibagi menjadi lima yaitu :

- a. Paradigma I (1900-1926) dikenal sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi. Pemisahan tersebut dimanifestasikan antara pemisahan badan legislatif yang mengekspresikan kehendak rakyat, sedangkan eksekutif mengimplementasikan kehendak tersebut, dan yudikatif hanya membantu legislatif dalam menentukan dan merumuskan kebijakan. Implikasinya administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai untuk mencapai efisiensi ekonomi dari *government bereaucracy*. Dalam Paradigma ini hanya akan menekankan lokus saja yaitu *government bereaucracy*, sedangkan fokus metode apa yang dikembangkan dalam administrasi kurang dibahas secara jelas dan terperinci
- b. Paradigma II (1927-1937) disebut sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi yaitu *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgentiong*. Prinsip tersebut digunakan sebagai fokus administrasi yang mampu diterapkan dimana saja. Sedangkan fokus administrasi publik tidak dijelaskan secara jelas.
- c. Paradigma III (1950-1970), paradigma administrasi Negara sebagai ilmu politik. Lokus dalam paradigma ini adalah birokrasi pemerintah sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Prinsip tersebut tidak memberi jalan

keluar tentang fokus yang dapat digunakan dalam administrasi publik. Sehingga pada masa ini administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap sebagai disiplin yang dominan dalam dunia administrasi publik.

- d. Paradigma IV (1956-1970) administrasi publik sebagai ilmu administrasi, fokus dari paradigma ini adalah prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Dua arah yang terjadi dalam paradigma ini adalah perkembangan ilmu administrasi murni yang ditunjang oleh disiplin ilmu psikologi sosial, serta yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus diasumsikan dapat diterapkan pada dunia bisnis dan administrasi publik, karena lokus dari administrasi publik menjadi tidak jelas.
- e. Paradigma V (1970-sekarang) disebut sebagai administrasi publik sebagai administrasi publik, fokus dan lokus dalam paradigma ini adalah jelas yaitu teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik adalah fokus administrasi publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

Berdasarkan paradigma tentang administrasi publik, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma V, yaitu dengan lokus masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik, sedangkan fokusnya adalah organisasi. Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD).

2.3 Good Governance

2.3.1 Pengertian Good Governance

Pada sekitar 1990-an menjelang berlangsungnya reformasi politik di Indonesia beberapa lembaga internasional, seperti UNDP dan *World Bank*, memperkenalkan terminologi baru yang disebut sebagai *good public governance* atau *good governance*. Saat ini istilah *good governance* merupakan kata yang sering diucapkan dalam berbagai ruang diskusi di Indonesia. Konsep ini memandang kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki pemerintah, melainkan

merupakan *networking* yang *balance* dan multi arah (partisipatif) antara lembaga pemerintah, semi pemerintah, non-pemerintah dan swasta. Bahkan dapat saja terjadi suatu “*governance without government*”, meskipun seringkali lembaga pemerintah tidak dapat ditinggalkan begitu saja.

Pierre Landell-Mills & Ismael Seregeldin dalam Pandji Santosa (2008:130) mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan Robert Charlick dikutip oleh Pandji Santosa (2008:130) mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Berasarkan pengertian diatas *good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

2.3.2 Prinsip – Prinsip Good Governance

Berdasarkan pengertian *good governance* diatas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparaturnegara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka menuntut penggunaan konsep *good governance* sebagai pemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Prinsip-prinsip *good governance* berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik, agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki *stakeholders*.

Prinsip-prinsip dari *good governance* menurut UNDP dalam Samodra Wibawa (2005:360) adalah :

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)
Setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).
2. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
Harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak memihak, berlaku pada semua warga negara.
3. Transparansi (*Transparency*)
Adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan. Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.
4. Responsif (*Responsiveness*)
Lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan “*basic needs*” (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya).
5. Konsensus (*Consensus Oriented*)
Jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan musyawarah mencapai konsensus.
6. Persamaan Hak (*Equity and Inclusiveness*)
Pemerintah harus memberikan kesempatan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan.
7. Keefisienan dan Keefektifan (*Effectiveness and Efficiency*)
Pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll.
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
Suatu perwujudan kewajiban dan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang

terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.

Prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik khususnya pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip otonomi yang seluas-luasnya agar dapat mencapai hasil kinerja yang dikehendaki *stakeholders*.

2.4 Konsep Otonomi Daerah

2.4.1 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah berarti penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan bagian dari peralihan sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang kemudian melahirkan pemerintah daerah dengan otonomi. Titik berat otonomi daerah adalah pada daerah tingkat II atau pada pemerintah daerah kabupaten/kota. menurut Widjaya (2011:37) yang menjadi dasar pertimbangan adalah bahwa daerah tingkat II merupakan daerah otonom yang lebih berhubungan dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memahami aspirasi masyarakat dalam rangka menciptakan keselarasan dan keserasian antara pemerintah dan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat.

Menurut Widjaja (2011:3), inti dari otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.

2.4.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Melalui Otonomi, diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat. Untuk tercapainya optimalisasi peranan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi pengawasan yang dapat dilakukan melalui kegiatan pelaporan pertanggung jawaban, monitoring, dan evaluasi.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Sehingga pemerintahan dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pengawasan merupakan upaya preventif untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan berupa KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh lembaga pengawasan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di daerah yang menjadi obyek pemeriksaan lembaga pengawasan internal. Obyek pemeriksaan (Obrik) Inspektorat provinsi meliputi semua SKPD Propinsi, serta beberapa lembaga perangkat daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan satuan kerja/obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota adalah SKPD Kabupaten/Kota yang terdiri dari sekretariat, dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis daerah, serta desa yang kemudian terhimpun dalam Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang kemudian dilaporkan kepada Presiden melalui Kementrian dalam Negeri tiap akhir tahun anggaran yang diatur dalam PP No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

2.4.3 Asas – Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pembagian urusan pemerintahan melahirkan asas-asas pemerintahan yang diantaranya adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berikut ini penjelasan rinci mengenai asas-asas pemerintahan daerah :

1. Asas Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *De* yang berarti lepas dan *Centrum* yang artinya pusat. *Decentrum* berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi berarti melepas atau menjauh dari pemusatan (Nurcholis, 2010:1.7). Menurut Gie desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang Pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah (Gadjong, 2007:81). Pendapat lainnya datang dari Tjahya Supriatna yang mengemukakan bahwa desentralisasi adalah pelimpahan urusan dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami wilayah tertentu (Ridwan, 2010: 123).

Dilihat dari beberapa pandangan para pakar di atas, desentralisasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, yaitu: pertama, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. Kedua, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran dan pemberian kekuasaan dan kewenangan. Keempat, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Desentralisasi memberikan peluang bagi

pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya secara mandiri, karena kondisi sebenarnya yang terjadi di daerah hanya pemerintah daerah yang mengetahuinya lebih mendalam yang bermanfaat dalam efektifitas suatu kebijakan yang mengatur masyarakat.

2. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi sebenarnya sentralisasi juga, tetapi lebih halus daripada sentralisasi (Nurcholis, 2010:1.5). Menurut Leica Marzuki, dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisastie* atau *delegatie van bevoegdheid*, yakni pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan (Gadjong, 2007:89). Amrah Muslimin berpendapat bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah (Ridwan, 2010: 125). Kertasapoetra mendefinisikan desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau juga kepala instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat-pejabat (bawahannya) di daerah (Gadjong, 2007: 90).

3. Asas Tugas Pembantuan

Koesoemahatmadja mengartikan tugas pembantuan sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut (Nurcholis, 2010:1.15-1.16). Ridwan (2010:126) memberikan pengertian bahwa tugas pembantuan adalah pemerintah menugaskan kepada pemerintah daerah otonom untuk ikut serta melakukan kewenangan urusan pemerintah dengan batasan-batasan pertanggung jawaban, dimana pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

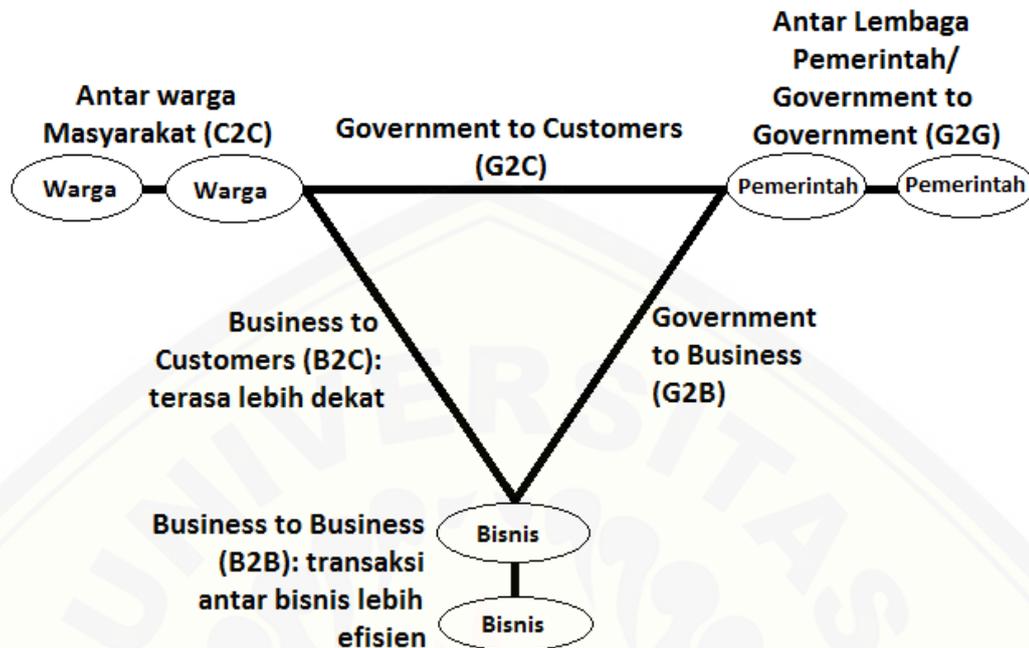
Pada pemerintah daerah yang berada pada tingkat kabupaten/kota, asas pemerintahan hanya terbatas pada asas desentralisasi dan tugas pembantuan, dimana dengan adanya asas pemerintahan daerah ini diharapkan terciptanya sinergitas antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta menggali potensi daerah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan LPPD maka perlu adanya suatu sistem informasi dalam bentuk *E-Government* guna mensinergitaskan proses LPPD sehingga tercipta administrasi yang lebih baik.

2.5 *E-Government*

Pengembangan sistem informasi dan telekomunikasi di lingkungan pemerintah dikenal dengan sebutan *E-Government (E-Gov)*. Menurut World Bank (Nugroho, 2008:165), istilah *E-Gov* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan. Tujuan-tujuan *E-Gov* antara lain:

1. Penyediaan akses yang mudah terhadap informasi dan layanan pemerintah ke masyarakat dan dunia usaha.
2. Peningkatan kualitas layanan dengan cara peningkatan kecepatan, kesempurnaan dan proses yang efisien.
3. Penyediaan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai proses demokrasi.
4. Interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat bagi kemajuan layanan publik yang semakin baik

Macam Interaksi yang ada dalam *E-Gov* dapat digambarkan pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Interaksi dalam *E-Gov*, tahun 2016 (Nugroho, 2008:166)

Dapat dilihat pada gambar 2.1 terdapat interaksi yang menghubungkan antara warga dengan warga, warga dengan bisnis, warga dengan pemerintah, bisnis dengan bisnis, pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan bisnis.

Menurut Nugroho (2008:167), Agar *E-Gov* berjalan sukses maka diperlukan 3 hal berikut, yaitu :

1. Infrastruktur teknologi harus mencukupi
2. SDM harus memiliki keterampilan yang memadai
3. Ketersediaan akses ke internet

Selain hal-hal tersebut, agar *E-Gov* sukses maka kepemimpinan harus kuat untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka rekayasa ulang semua sistem dan prosedur dari cara yang konvensional kepada cara baru yang berbasis telematika.

Tahapan Pengembangan aplikasi *E-Gov* diklasifikasi menjadi 3 tahap yaitu sebagai berikut (Nugroho, 2008: 167) :

1. Tahap Publikasi

Pada tahap ini aplikasi *E-Gov* digunakan terutama untuk publikasi tentang kegiatan pemerintah kepada masyarakat. melalui pelayanan tersebut antara lain situs internet, masyarakat dapat melihat berbagai macam kegiatan pelayanan pemerintah yang dilakukan bagi masyarakat

2. Tahap interaksi

Pada tahap ini aplikasi *E-Gov* sudah dapat melayani permintaan masyarakat tentang suatu informasi berdasarkan kriteria tertentu yang dikehendaki, termasuk apabila masyarakat ingin mengunduh suatu informasi atau formulir dari pemerintah sehingga aktivitas ini dapat dilakukan.

3. Tahap Transaksi

Pada tahap ini masyarakat sudah dapat melakukan transaksi tentang suatu pelayanan pemerintah melalui media elektronik, misalnya pembayaran pajak melalui internet dan sebagainya.

Ada berbagai kesalahpahaman yang terjadi berkaitan dengan *E-Gov*. Masyarakat awam sering berfikir bahwa kalau sudah ada komputer maka semuanya “*beres*”. Tentu saja tidak sesederhana itu. Ada banyak hal yang harus dilakukan agar implementasi *E-Gov* sukses. Menurut Nugroho (2008:169) *E-Gov* pada dasarnya memiliki komponen teknologi hanya sekedar 20%, sisanya adalah perubahan sistem prosedur dan kualitas SDM-nya. Oleh karena itu, *E-Gov* tidak dapat secara instan menyelesaikan masalah efektivitas, efisiensi, transparansi dan lain-lain tersebut. Seringkali juga awam, baik masyarakat maupun pegawai pemerintah, berharap terlalu tinggi pada aplikasi telematika sehingga ketika aplikasi tersebut diimplementasikan dan belum memenuhi harapan karena berbagai macam sebab lantas kecewa. Memang perlu dipahami bahwa aplikasi telematika tidak bisa dipaksakan apabila penggunaannya belum siap. Maka dari itu perlu adanya suatu persiapan yang matang guna mencapai tujuan organisasi.

2.6 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sebuah bidang yang mulai berkembang sejak tahun 1960an. Walaupun tidak terdapat konsensus tunggal, secara umum, menurut Nugroho (2008:16) SIM adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi mengelola informasi bagi manajemen organisasi. Konsep Sistem Informasi Manajemen saat ini berkembang seiring perkembangan fokus penggunaan teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer saat ini telah memberikan kesadaran baru bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan manajemen. Tujuan dibentuknya Sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen baik yang berkaitan dengan keputusan keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis.

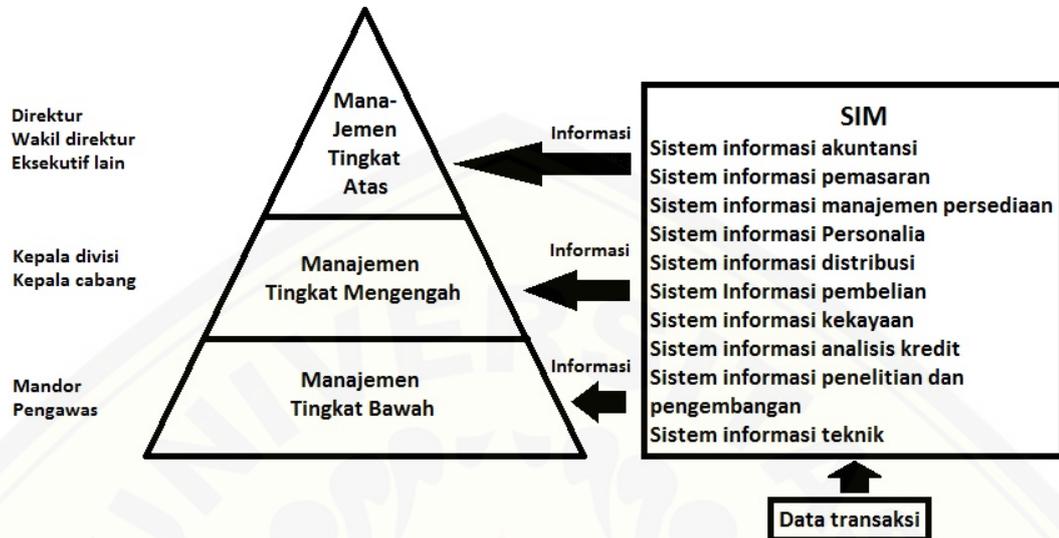
Sistem Informasi Manajemen merupakan kumpulan dari sistem-sistem informasi. SIM tergantung dari besar kecilnya organisasi dapat terdiri dari sistem-sistem informasi sebagai berikut (Nugroho,2008):

1. Sistem Informasi Manajemen Perusahaan
2. Sistem Informasi Institusi Pendidikan
3. Sistem Informasi Rumah Sakit
4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Jenis sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah (*lower level management*), manajemen tingkat menengah (*middle level management*) dan manajemen tingkat atas (*top level management*).

Top level management dengan *executive management* dapat terdiri dari direktur utama (*president*), direktur (*vise-president*) dan eksekutif lainnya di fungsi-fungsi pemasaran, pembelian, teknik, produksi, keuangan dan akuntansi. Sedang *middle level management* dapat terdiri dari manajer-manajer divisi dan manajer-manajer cabang. *Lower level management* disebut dengan *operating management* dapat meliputi mandor dan pengawas. *Top level management* disebut

juga dengan *strategic level*, *middle level management* dengan *tactical level* dan *lower management* dengan *tehcnicall level*.



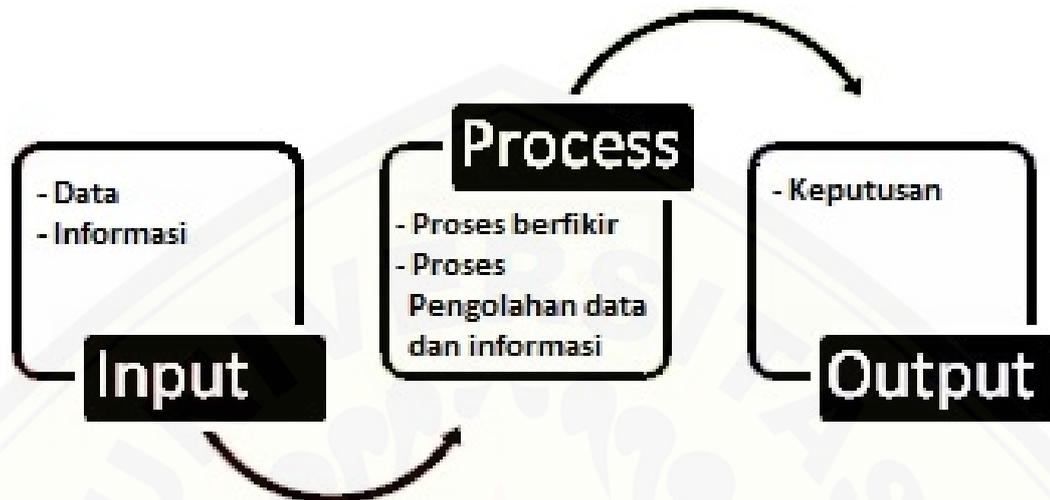
Gambar 2.2 Informasi dan SIM untuk semua tingkat manajemen, tahun 2016 (Nugroho, 2008:73)

Dalam hal ini, pemahaman tentang istilah Sistem Informasi Manajemen akan diperoleh dengan cukup baik apabila seorang mampu memahami tentang sistem, informasi, dan manajemen yang akan dibahas pada subbab selanjutnya.

2.6.1 Sistem Informasi

Sistem Informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Kedua kata tersebut memiliki definisi masing-masing. Sistem menurut Eko Nugroho (2008:17) sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan definisi dari Informasi menurut Tata Sutabri (2005:23) adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan definisi sistem dan informasi maka sistem informasi dapat didefinisikan sebagai seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi.

Menurut Eko Nugroho (2008:17) Terdapat 3 aktivitas sistem informasi yang terdiri atas input, proses, output yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3 aktivitas sistem informasi, tahun 2016 (Nugroho, 2008:17)

1. Input merupakan bagian yang bertugas menerima data masukan dimana data dapat berupa asal masukan, frekuensi masukan data dan jenis masukan data.
2. Proses merupakan bagian yang mengolah data menjadi informasi sesuai dengan keinginan pemakai.
3. Output merupakan keluaran atau tujuan dari sistem yang didapat dari input dan proses yang dilakukan.

Ada tiga pilar utama yang menentukan kualitas informasi (Nugroho, 2008:16) adalah sebagai berikut :

1. Akurat

Informasi tersebut bebas dari kesalahan dan bebas dari bias. Bebas dari kesalahan berarti bahwa informasi tersebut benar-benar menyatakan apa yang harus dinyatakan. Bebas dari bias berarti bahwa informasi tersebut teliti.

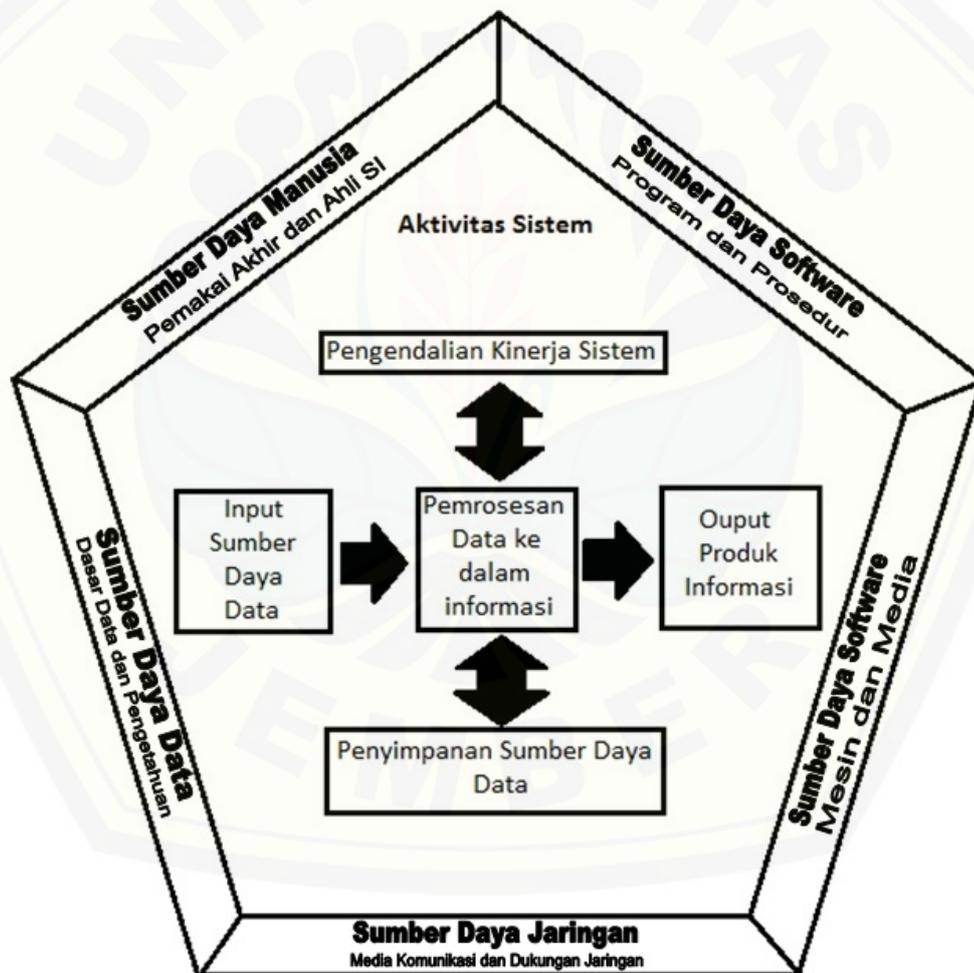
2. Tepat Waktu

Jelas informasi harus diberikan pada waktu yang tepat. Informasi yang sudah kadaluarsa hanya bernilai sampah, sekalipun informasinya sama dan tidak berubah.

3. Relevan

Artinya bahwa informasi tersebut benar-benar sesuai kebutuhan pihak yang membutuhkan informasi.

Dalam sistem informasi, terdapat komponen yang berperan penting dalam pelaksanaan sistem informasi, yaitu seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.4 Komponen Sistem Informasi, tahun 2016 (O'Brien, 2010:32)

Model sistem informasi menurut James O'Brien (2010:32) yang menunjukkan kerangka konsep dasar untuk berbagai komponen dan aktivitas sistem informasi. Sistem informasi bergantung pada sumber daya manusia,

hardware, *software*, data, serta jaringan untuk melakukan *input*, pemrosesan, *output*, penyimpanan, dan aktivitas pengendalian yang mengubah sumber daya data menjadi produk informasi. Berikut penjelasan mengenai komponen Sistem Informasi :

1. Sumber Daya Manusia

Manusia dibutuhkan untuk pengoperasian semua sistem informasi, sumber daya manusia ini meliputi pemakai akhir yaitu, orang-orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan sistem tersebut dan pakar sistem informasi yaitu, orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi

2. Sumber Daya *Hardware*

Konsep sumber daya pemrosesan informasi. Secara khusus, sumber daya ini meliputi tidak hanya mesin, seperti komputer dan perlengkapan lainnya, tetapi juga semua media data, yaitu objek berwujud tempat data dicatat, dari lembaran kertas hingga *disk magnetis* atau *optical*.

3. Sumber Daya *Software*

Sumber daya *software* meliputi semua rangkaian perintah pemrosesan informasi. Konsep umum *software* ini meliputi rangkaian perintah operasi dengan *hardware* komputer yang disebut program, rangkaian perintah pemrosesan informasi yang disebut prosedur.

4. Sumber Daya Data

Sumber daya data dapat berupa angka, huruf serta karakter lainnya yang menjelaskan transaksi bisnis dan kegiatan serta entitas lainnya. Data teks berupa kalimat yang digunakan untuk menulis komunikasi, data gambar, seperti grafik dan angka-angka. Serta data dalam bentuk audio dan video.

Sumber daya data pada umumnya disimpan, diatur dan diakses oleh berbagai teknologi pengelolaan sumber daya data ke dalam :

- a. *Database* yang menyimpan data yang telah diproses dan diatur.
- b. Dasar pengetahuan yang menyimpan pengetahuan dalam berbagai bentuknya seperti fakta, peraturan.

5. Sumber Daya Jaringan

Teknologi telekomunikasi dan jaringan seperti *Internet*, *Intranet*, dan *ekstranet* telah menjadi hal yang mendasar bagi operasi *e-business* dan *e-commerce* yang berhasil untuk semua jenis organisasi dan dalam sistem informasi berbasis komputer. Jaringan telekomunikasi terdiri dari komputer, pemroses komunikasi dan peralatan lainnya yang dihubungkan antara satu dengan lainnya melalui media komunikasi serta dikendalikan melalui *software* komunikasi. Sumber daya jaringan meliputi :

- a. Media komunikasi, misalnya kabel *twisted-pair*, kabel tembaga, kabel serat optik, teknologi gelombang mikro, seluler dan satelit yang tanpa menggunakan kabel.
- b. Dukungan Jaringan, dalam hal ini diperlukan banyak dukungan *hardware*, *software*, dan teknologi data untuk mendukung operasi dan penggunaan jaringan komunikasi. Contoh : pemroses komunikasi seperti modem, *processor* antar jaringan, *software* pengendali, seperti *software* sistem operasi jaringan dan penjelajah internet.

Kelima komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain, komponen sistem informasi tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan perkembangan yang cukup baru yakni, informasi informal yang dalam banyak aplikasi dan teorisasi belum banyak disinggung.

2.6.2 Manajemen

Manajemen adalah suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk menjadi pengendali organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai organisasi (Nugroho, 2008:57). Dari prinsip-prinsip administrasi klasik, kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tercakup dalam akronim POSDCORB (*planning, organizing, staffing, directing, coordinating/controlling, budgeting*). Lebih ringkas lagi, kegiatan manajemen tercakup dalam tiga kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

Dalam perencanaan, manajer mendefinisikan tujuan organisasi, menentukan arah tindakan bagi organisasi, serta menentukan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan organisasi. Dalam pengorganisasian, manajer

mengatur atau menata kegiatan-kegiatan operasional supaya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, antara lain dengan mengadakan pembagian kerja, penetapan struktur kewenangan dan rantai komando, penempatan pegawai dalam satuan-satuan organisasi dan sebagainya. Pengendalian manajer mengadakan evaluasi apakah prestasi yang dicapai oleh organisasi telah sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan.

2.6.3 Sistem Informasi Manajemen Organisasi Publik

Kumorotomo dan Margono (1998:75) mengatakan, sistem informasi manajemen dalam administrasi negara merupakan sebuah proses. Sistem informasi manajemen itu sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa subsistem, antara lain: *user*, yang meliputi pimpinan tingkat atas, menengah dan operasional. Subsistem yang lain yakni analisis sistem informasi manajemen (termasuk dalamnya adalah *programer*) sebagai proses setiap pembahasan konsep SIM menghendaki proses manajemen data, yang meliputi proses pengolahan data baik itu menggunakan cara manual ataupun menggunakan komputer yang banyak hal efektivitas dan kompleksitasnya sangat tergantung dari perkembangan teknologi baik *hardware* maupun *software*-nya. Proses selanjutnya yang cukup menentukan adalah proses analisis informasi dari analisis sistem serta proses pembuatan keputusan itu sendiri yang mencakup dimensi manajemen dalam organisasi, baik segi kepemimpinan, komunikasi maupun kompleksitas struktur organisasi.

Kumorotomo & Margono (2009:71) mengemukakan bahwa Sistem informasi manajemen merupakan salah satu konsep yang penting dalam ilmu administrasi negara. Organisasi publik sebagai fokus dalam ilmu administrasi negara selalu mengkaitkan segala sumber daya dalam mencapai tujuannya. Salah satu sumber daya yang cukup penting adalah informasi. Bahkan, menurut Murdick (1995:5) informasi ini dianalogikan sebagai darah dalam organisasi. Ini berarti kalau aliran darah mengalami hambatan, maka organisasi akan jatuh pada posisi tidak sehat.

Indikator kesehatan organisasi akan terlihat pada: lancar tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Ketidakstabilan dalam pencapaian tujuan karena

terhambatnya informasi dapat terlihat pada hasil keputusan yang tidak didukung dengan informasi yang berkualitas, yang dibarengi dengan proses komunikasi yang tidak sampai sasaran serta pengaruh dari hasil proses manajemennya. Untuk itu dibutuhkan komponen sistem informasi manajemen pada organisasi publik sebagaimana dikemukakan oleh Land dan McGregor dalam Galliers 1987 (dalam Kumorotomo (2009:84) sebagai berikut.

- a. Sistem informal yang meliputi sistem diskursus dan interaksi antara individu dan kelompok kerja di dalam organisasi. Karakteristik yang menonjol dalam situasi ini adalah perlunya memperhitungkan sifat-sifat politik dan budaya dalam organisasi yang termanifestasi dalam negosiasi dan tawar menawar. Penilaian yang sifatnya subjektif menjadi bagian yang penting dalam organisasi. Proses yang demikian memang sangat kompleks, khususnya yang menyangkut analisis kebijakan. Tanpa hal ini organisasi tidak akan berjalan.
- b. Sistem formal meliputi sistem aturan, batasan-batasan organisasi dan batasan-batasan wewenang. Hal ini biasanya diorganisasikan secara hierarkis yang meliputi tidak hanya aturan organisasi tetapi metode-metode kerja yang dikaitkan dengan berbagai macam profesi yang berada dalam organisasi
- c. Sistem komputer formal yang meliputi aktivitas-aktivitas organisasi melalui formalisasi dan pemrograman. Sistem komputer bukan merupakan sistem yang independen, melainkan merupakan sistem yang berinteraksi dengan faktor manusia (dalam konteks formal) dan dengan aturan kerja. Prinsip yang diterapkan adalah bebas nilai, tetapi dalam prakteknya sistem informasi manajemen dan organisasi sangat diwarnai dengan nilai-nilai dari mereka yang mendesain sistem. Efektivitasnya sangat tergantung pada kecepatan, reliabilitas, ketepatan, prediksi dan efisiensi.
- d. Sistem komputer informal dikaitkan dengan penanganan komputer secara personal dan kemungkinan penggunaan sistem formal serta jaringan komputer sebagai sarana penyatuan informasi yang tidak terstruktur dan informasi-informasi informal. Sistem informasi informal ini merupakan

komponen dalam sistem informasi manajemen yang relatif baru dibandingkan dengan komponen-komponen yang lain, tetapi memberikan kemungkinan perbaikan penyesuaian antara sistem informal dengan organisasi dan sistem formal. Dalam *decision support system* keterkaitan informasi formal dan informal sangat dibutuhkan. Tidak ada organisasi yang hidup dalam isolasi dan keterkaitan antara organisasi dengan lingkungan eksternal harus terjadi.

Kerangka sistem informasi manajemen sebenarnya dikenal dua konsep yang berhubungan langsung dengan pembuatan keputusan, yaitu SDS (*structured decision system*) dengan DSS (*decision support system*) menurut Gorry dan Morton dalam Golembiewski, 1976 (dalam Kumorotomo (2009:97), SDS sangat identik dengan konsep sistem informasi manajemen didalam terminologi sistem informasi.

Konsep sistem informasi mengandung dua pengertian, yang pertama sistem informasi manajemen. Sistem ini dilukiskan sebagai serangkaian prosedur dan mekanisme dalam rangka akumulasi data, penyimpanan, pengambilan yang didesain untuk mengkonversi data organisasi menjadi informasi yang sesuai dalam pembuatan keputusan manajerial. Sistem informasi manajemen secara umum menggolongkan data yang dihasilkan melalui sistem transaksi yang meliputi data tentang klien, fasilitas, pegawai, penggajian, penyediaan layanan, penyimpanan barang dan lain-lain. Data ini disimpan dalam *database* yang digunakan untuk manajemen level operasional, menengah dan atas begitu juga untuk mendukung staf. Sedangkan DSS dilukiskan sebagai sistem komputer yang interaktif yang memiliki posisi pada model keputusan analitis dan dispesialiskan ke dalam *database* manajemen yang bisa langsung di akses oleh manajer/pimpinan dan dapat digunakan untuk membantu manajemen di dalam semua level organisasi dengan jenis keputusan yang tidak terstruktur dan problem-problem yang tidak rutin. Rubin dalam PAR, 1986 (dalam Kumorotomo, 2009:97-98).

Maka dapat disimpulkan penerapan sistem informasi manajemen pada organisasi publik jika digolongkan pada informasi yang dihasilkan melalui sistem transaksi data yang didukung oleh sistem komputer yang interaktif akan dapat memberikan kemudahan pada para pimpinan organisasi untuk melakukan pengambilan keputusan tentang lingkungan eksternal dalam bentuk penyediaan layanan publik dengan memberikan kemudahan layanan informasi. Hal ini akan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pengolahan dan penyediaan layanan secara manual.

2.6.4 Faktor-faktor Keberhasilan Sistem Informasi Manajemen

Pengembangan solusi sistem informasi yang baik dipaparkan oleh O'Brien (2005) dan dapat diimplementasikan serta dikelola melalui beberapa tahapan proses atau siklus yaitu investigasi (*investigate*), analisa (*analyze*), desain (*design*), implementasi (*implement*), dan memelihara (*maintain*).

Faktor keberhasilan sistem informasi menurut Rosemary Cafasso dalam O'Brien (2005), antara lain disebabkan oleh:

1. Keterlibatan pengguna dalam proses implementasi.

Pengguna sistem informasi dalam organisasi harus terlibat secara keseluruhan dan memahami dengan baik bagaimana sistem informasi diimplementasikan. Pemetaan dari para pengguna sistem informasi yang terlibat juga harus sesuai. Desain dan operasi sistem yang mudah dipahami dan digunakan akan membantu para pengguna untuk terlibat penuh dan mengolah data informasi menggunakan sistem informasi dengan optimal.

2. Tingkat dukungan manajemen bagi upaya implementasi.

Apabila suatu sistem informasi telah didesain dan dioperasikan, maka dibutuhkan dukungan dari manajemen organisasi agar implementasi dari penggunaan sistem informasi dapat berjalan dimasing-masing level manajerial. Dukungan manajemen yang cukup akan membantu dalam kesuksesan suatu sistem informasi seperti dalam hal dana perawatan perangkat lunak sistem serta pengembangan sistem informasi.

3. Kejelasan pernyataan kebutuhan

Kebutuhan akan sistem informasi yang akan digunakan oleh organisasi harus dijabarkan dengan jelas dan terperinci oleh organisasi, agar sistem yang didesain sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Walaupun suatu sistem dikembangkan dengan teknologi yang mutakhir namun tidak dapat digunakan dengan baik maka dapat menyebabkan kerugian.

4. Perencanaan yang tepat

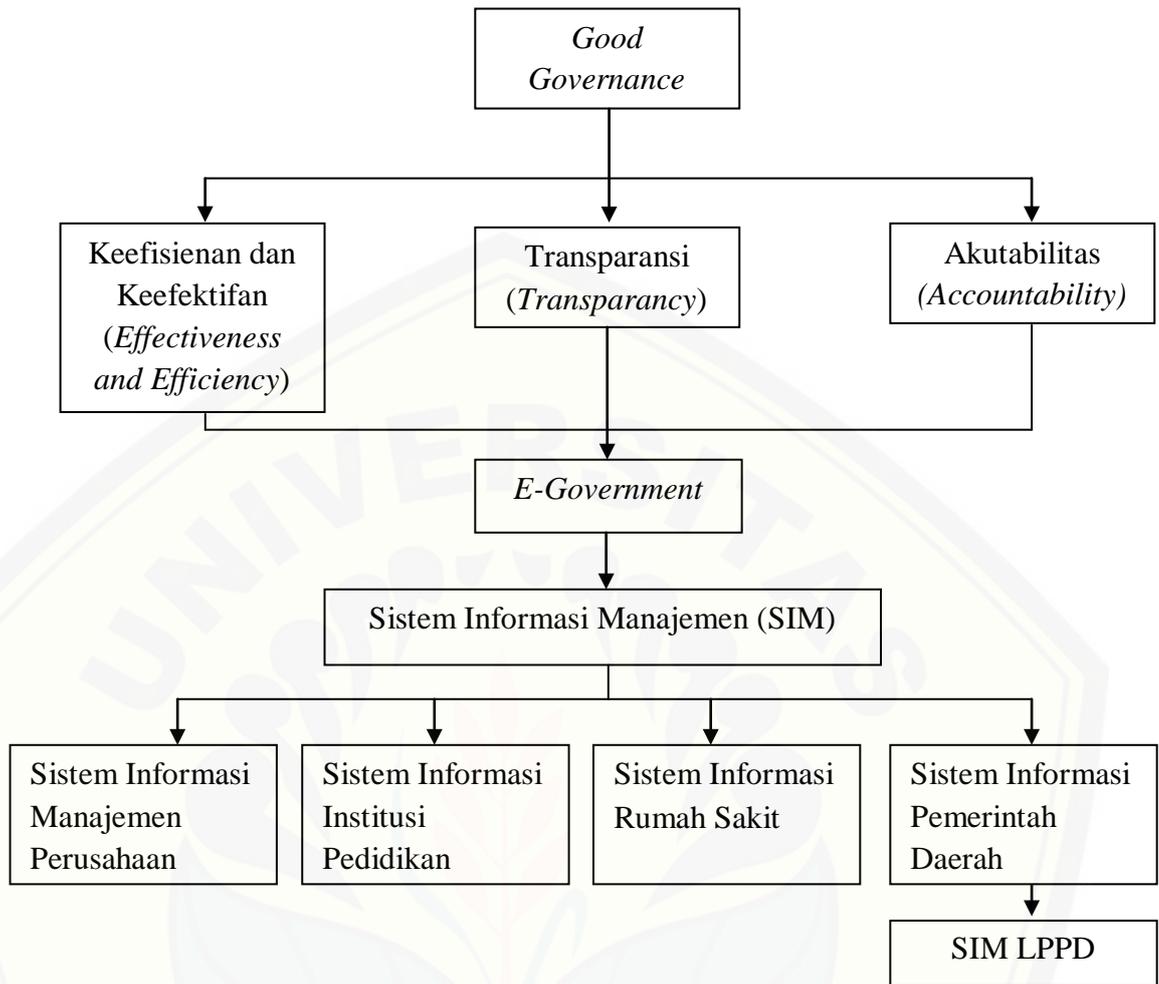
Perencanaan penggunaan sistem informasi yang tepat juga sangat diperlukan dalam implementasi sistem informasi. Tepat dalam penggunaan waktu, dana, dan sumber daya diperlukan rencana yang terperinci.

5. Harapan yang realistis

Ekspektasi akan suksesnya suatu sistem informasi dapat berjalan juga harus diimbangi dengan realistis. Agar sistem informasi yang sudah didesain dan diimplementasikan sesuai dengan ekspektasi yang ditentukan pada awal pembuatan sistem informasi tersebut.

2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi yang merupakan metode baru dalam pelaksanaan LPPD yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dalam penelitian ini peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berpikir yang diharapkan dapat memberi jalan bagi proses pemikiran peneliti dalam menjawab tujuan penelitian. Kerangka berpikir dibuat oleh peneliti dalam bentuk bagan seperti berikut ini,



Gambar 2.5 Kerangka berpikir penelitian, tahun 2016

BAB 3. METODE PENELITIAN

Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap reliabel dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh peneliti sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Sementara itu, Sudjana (1991:52) secara lebih teknis menjelaskan bahwa metode merupakan suatu penekanan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan. Berdasarkan definisi mengenai metode dan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dengan langkah-langkah yang sistematis.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Bab metode penelitian ini akan menguraikan beberapa subbab yang meliputi:

- a. Jenis penelitian;
- b. Tempat dan waktu penelitian;
- c. Data dan sumber data;
- d. Penentuan informan penelitian;
- e. Teknik dan alat pengumpulan data;
- f. Teknik menguji keabsahan data;
- g. Teknik penyajian dan analisis data; dan
- h. Prosedur penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mengemukakan jenis penelitian sebagai penegasan kategori penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Dimana dalam judul dan masalah yang ada, peneliti menggunakan metode yang menggambarkan atau mendiskripsikan keadaan suatu objek penelitian, model ini lebih dikenal dengan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2008:36).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan dalam objek penelitian. Seperti yang dikemukakan Silalahi (2012:38) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2004:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita pahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya memberikan gambaran dan uraian secara jelas dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen yang penting untuk diperhatikan karena akan sangat mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini karena penelitian yang dilakukan bermula dari adanya suatu permasalahan yang terjadi di suatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Oleh karena itu, penentuan tempat dan waktu penelitian haruslah memiliki relevansi dengan lokasi, waktu pelaksanaan penelitian serta kurun waktu terjadinya masalah yang menjadi objek dan bahasan penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian.

Didalam penelitian ini bertempat di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani, No. 100, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Belum terdapat penelitian di Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengkaji secara mendalam mengenai Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang serius dalam melakukan reformasi birokrasi, hal tersebut tercermin dari lahirnya Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2004 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2014-2018 dimana dengan tegas Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi melalui mempertahankan dan meningkatkan peringkat LPPD dari tahun ke tahun.

Waktu penelitian ini dilakukan peneliti pada tahun 2016 dengan objek penerapan SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2015. Berikut waktu penelitian yang dilakukan oleh Peneliti :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Waktu
1.	Penyusunan Proposal Penelitian	Maret 2016
2.	Penelitian Awal	April 2016
3.	Seminar Proposal	Mei 2016
4.	Penelitian	Juni-Juli 2016
5.	Pengolahan dan Hasil Penelitian	Juli 2016
6.	Penyusunan Hasil Penelitian	Juli 2016
7.	Ujian Hasil Penelitian	April 2017

3.3 Data dan Sumber Data

Di dalam sebuah penelitian, data merupakan salah satu instrumen penelitian yang memegang peranan penting. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) data adalah himpunan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka maupun deskripsi yang berasal dari sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk kata-kata dan gambar bukan angka. Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:284) menjelaskan sebagai berikut:

“Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.”

Pengertian sumber data menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) adalah penjelasan mengenai sumber atau asal data penelitian yang diperoleh. Secara umum sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut “*first hand information*” dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yang meliputi:

1. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD)

Kabupaten Banyuwangi dari hasil observasi atau pengamatan dan catatan lapangan secara langsung, dokumentasi, dan wawancara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat peneliti dari hasil studi literatur dan dokumentasi terkait SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi. Dimana data yang tersedia pada penelitian ini berupa,

- a. LPPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2015
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2015
- c. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD..
- d. Hasil Pemeringkatan LPPD berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012;23), Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. Berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti;
- c. Memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan
- d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitas atas masalah yang diteliti.

Jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti menjadikan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai objek penelitian utama yang didalamnya terdapat informan yang memiliki tanggung jawab dan secara intensif berinteraksi secara langsung terhadap LPPD yang merupakan bagian dari Tupoksi Bagian Pemerintahan dalam terselenggaranya LPPD. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai dapat memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan dengan pertimbangan bahwa informan ini merupakan aktor yang terlibat langsung dan memahami secara baik terkait pelaksanaan SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi yaitu Bapak Abdur Rachman, dimana bapak Abdur Rachman ini merupakan pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap terselenggaranya LPPD Kabupaten Banyuwangi dan penerapan SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi.
- b. Penyusun LPPD Kabupaten Banyuwangi sekaligus Admin SIM LPPD pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu Bapak M. Prima Kharisma Jabara, dimana Bapak Prima ini merupakan pihak yang menyusun LPPD Kabupaten Banyuwangi dan sebagai admin SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi yang secara langsung memahami penggunaan SIM pada LPPD Kabupaten Banyuwangi.

Pada Penelitian ini, terdapat beberapa masalah terkait penerapan SIM LPPD, dimana untuk menggali informasi terkait masalah yang terjadi pada penerapan SIM LPPD ini peneliti memilih informan pendukung yang bertujuan untuk menjelaskan konten-konten tertentu terkait dengan permasalahan yang ada khususnya pengisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK), berdasarkan klasifikasi SKPD yang paling tidak baik dan baik dalam pelaksanaan LPPD yang didasarkan pada isian data LPPD selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011 hingga 2015. Selain itu juga peneliti memilih informan pendukung dari pihak eksternal yang

tidak terkait secara langsung dalam pelaksanaan SIM LPPD yang terdiri dari PNS non struktural dan masyarakat Kabupaten Banyuwangi untuk memperdalam informasi terkait penerapan SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini adalah informan pendukung yang peneliti pilih, yaitu :

- a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi yaitu Bapak Tjatur Hidayat Nugroho, dimana Bapak Tjatur ini merupakan penyusun LPPD pada Dinas PU Pengairan yang bertugas untuk menginput data pada SIM LPPD. Peneliti memilih Dinas PU sebagai bagian dari objek pendukung karena pada pengklasifikasian yang peneliti telah buat pada tabel 1.5, Dinas PU Pengairan merupakan SKPD dengan rekam jejak tidak baik dalam pelaksanaan LPPD dengan 142 data TDI dalam pengisian IKK pada SIM LPPD.
- b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi yaitu Ibu Evy Aria Lestari, dimana Ibu Evi ini merupakan penyusun LPPD pada BKD yang bertugas untuk menginput data pada SIM LPPD. Peneliti memilih BKD karena berdasarkan rekam jejak pelaksanaan LPPD selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011 hingga 2015 BKD merupakan SKPD yang sangat baik dalam pelaksanaan LPPD dimana tidak terdapat data TDI dalam melakukan pengisian IKK pada SIM LPPD.
- c. Pegawai PNS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi yaitu Ibu Siti Nurjanah, dimana Ibu Siti ini merupakan pihak eksternal yang tidak terkait secara langsung dalam pelaksanaan LPPD dan SIM LPPD yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait seberapa informatif penggunaan konten ILPPD pada SIM LPPD.
- d. Petani Kabupaten Banyuwangi yaitu Bapak Sodikin, dimana Bapak Sodikin ini merupakan pihak eksternal yang tidak terkait secara langsung dalam pelaksanaan LPPD dan SIM LPPD yang diharapkan

dapat memberikan informasi terkait seberapa informatif penggunaan konten ILPPD pada SIM LPPD.

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Di dalam penelitian kualitatif, data merupakan salah satu instrumen yang didapat dari berbagai sumber yang setelah itu akan diolah menjadi sebuah informasi yang mendukung hasil dari penelitian tersebut. Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan bahwa teknik dan alat pengumpulan data merupakan cara dan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau pengukuran. Menurut Sugiyono, (2011;233) teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan data tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Telaah Pustaka

Menurut Silalahi (2012:96) telaah pustaka memiliki peranan penting dalam penelitian untuk menghindari duplikasi, membantu merancang tahapan penelitian dan membantu peneliti untuk membentuk kerangka teoritis terkait masalah penelitian yang akan dikaji.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) yang dikutip dari sugiyono (2014:166). Mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. Faisal (1990) sebagaimana yang dikutip dalam sugiyono (2014:64) observasi diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu observasi partisipatif, observasi terang-terangan, dan tersamar. Pada jenis penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi terang-terangan dimana sedari awal peneliti akan berterus terang kepada sumber terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. Namun, tidak menutup kemungkinan peneliti

menggunakan metode tersamar untuk menghindari proses penyimpanan data yang dilakukan secara rahasia oleh sumber data. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses observasi ini adalah kamera *handphone* milik peneliti untuk mendokumentasikan hasil observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dokumentasi menurut Sugiyono (2014:82) merupakan catatan peristiwa yang sudah beralu. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moleong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berikut ini:

- a. Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong;
- b. Berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian; dan
- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks;

Dari penelitian ini, dibutuhkan berbagai dokumen yang relevan terkait dengan pelaksanaan SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi. Dokumen yang dibutuhkan antara lain PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, yang berisi mengenai Tata cara penyusunan LPPD; Dokumen mengenai Penerapan SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi; Dokumen mengenai SKPD terkait yang wajib menyerahkan LPPD kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tiap tahunnya; serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penggunaan SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi.

4. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2014:72) mengemukakan bahwasannya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg juga mengklasifikasikan wawancara kedalam tiga kategori, yaitu : wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan

wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu jenis wawancara semistruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Untuk itu dirasa sangat perlu peneliti menggunakan teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini sebagai salah satu metode penelitian. Menurut Moleong (2014:327) teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tabel Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas(derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikut-sertaan
	2. Ketekunan pengamatan
	3. Triangulasi
	4. Pengecekan sejawat
	5. Kecukupan referensial
	6. Kajian kasus negatif
	7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data diatas, teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah didapatkan. menurut Moleong

(2014:330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami. Dengan ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan ini diharapkan peneliti akan mampu menelaah secara lebih rinci tentang faktor-faktor yang menonjol dalam fenomena yang diteliti sehingga mampu memberi uraian yang mendalam untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data tersebut.

2. Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) berikut ini:

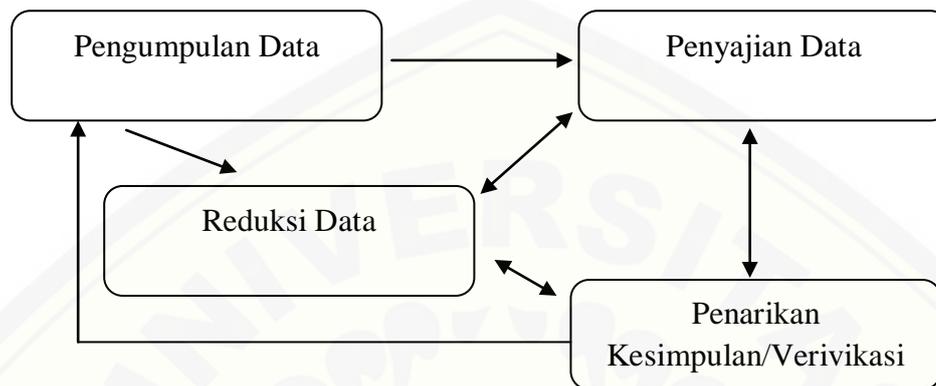
- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data;
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan teknik penyajian dan analisis data sebagai metode atau cara mengkaji dan mengolah data awal atau data mentah menjadi informasi dan uraian tentang cara analisisnya. Teknik penyajian data (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut.

Berdasarkan definisi mengenai teknis analisis data di atas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk siklus dan dilaksanakan secara bersamaan, tiga alur tersebut terdiri dari reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses siklus analisis data kualitatif ini berlangsung dari sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data hingga sesudah pengumpulan dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan yang mendalam terkait masalah yang diteliti.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340)

Dari gambar diatas dapat kita jelaskan proses analisis interaktif meliputi :

1. Reduksi data Menurut Silalahi (2012:340), adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut.
2. Penyajian data menurut Silalahi (2012:340), merupakan penyajian data merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.
3. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan, merupakan proses terakhir setelah penyajian data. menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data-data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. penyajian data

kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan. Penyajian data tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk memahami esensi atau abstraksi dari data yang diperoleh sehingga peneliti dapat melakukan tindakan.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2009:24) kesimpulan merupakan pernyataan yang tegas, tidak menimbulkan multitafsir dan merupakan pernyataan akhir penalaran deduktif-induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji. Berdasarkan analisis dan pembahasan atas data yang terkumpul, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan SIM LPPD pada Pelaksanaan LPPD di Kabupaten Banyuwangi pertama kali digunakan pada tahun 2011 untuk penyusunan LPPD tahun 2010. Dalam penerapannya, SIM LPPD sudah memiliki rancangan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan terhadap penyusunan LPPD Kabupaten Banyuwangi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam masalah baik secara sistem maupun pada manusianya. Hal ini jelas akan memberikan pengaruh terhadap jalannya penerapan SIM LPPD sehingga tujuan dari dibuatnya SIM LPPD tidak terealisasi dengan baik.
2. Komponen sistem Informal diaplikasikan pada SMS *Gateway* yang berfungsi menghubungkan antara penyusun LPPD pada Kabupaten dengan Penyusun LPPD yang berada di SKPD, bentuk interaksinya berupa pengiriman pesan singkat berupa SMS secara 2 arah yang dibangun dalam kerangka DSS (*decision support system*). Kendala yang terjadi pada aplikasi ini ialah lambatnya respon aplikasi terhadap interaksi 2 arah yang diinginkan oleh penyusun, sehingga terjadi keterlambatan pesan yang membuat proses interaksi menjadi kurang maksimal. Selain itu juga dengan perkembangan jaman membuat SMS menjadi kurang diminati sehingga penyusun LPPD lebih banyak berinteraksi melalui aplikasi media sosial pada *Smartphone* seperti *Whatsapp* dan *BBM* yang dirasa lebih cepat dan praktis.

3. Komponen Sistem Formal berisi komponen prosedur dan metode kerja pada penerapan SIM LPPD, dimana pada SIM LPPD diterapkan pada aplikasi pengentrian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dibangun dengan kerangan SDS (*Structured Decision System*). Didalam pelaksanaannya terdapat data yang masih terklasifikasi dalam TDI (tidak terisi), hal ini disebabkan oleh kurang tanggapnya penyusun LPPD di SKPD dalam melakukan entri data ke dalam aplikasi pengentrian IKK. Hal ini dikarenakan data yang tidak tersedia karena kurangnya koordinasi antar bidang pada SKPD yang membuat data belum terekap. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila kepala SKPD selaku *Top Management* melakukan fungsi *controlling* terhadap SIM LPPD yang juga menyebabkan penyusun LPPD menjadi kurang antusias dalam proses pelaksanaan LPPD sehingga data yang seharusnya dapat diusahakan ada menjadi tidak ada.
4. Komponen Sistem Komputer Formal dalam hal ini membahas mengenai manajemen *database* pada pelaksanaan SIM LPPD yang telah terbangun dalam kerangka DSS (*decision support system*). Dalam hal ini terjadi kendala yang terjadi ialah pada sistem *traffic control* pada SIM LPPD dimana pelaksanaannya terkadang terjadi gangguan apabila para user yang dalam hal ini adalah penyusun LPPD melakukan akses bersamaan sehingga menyebabkan aplikasi SIM LPPD sulit untuk diakses. Hal ini karena kemampuan jaringan yang kurang mampu menampung *traffic online* pada saat yang bersamaan dalam satu server.
5. Komponen Sistem Komputer Informal membahas mengenai komponen yang memiliki batasan pada informasi terkait LPPD dalam satu arah pada koneksi internal yang berfungsi sebagai Referensi bagi penyusun LPPD dalam melakukan proses penyusunan LPPD. Kendala yang terjadi ialah kurangnya koordinasi antara penyusun LPPD Kabupaten dan SKPD terkait informasi yang tersedia pada narasi sehingga data yang diberikan oleh SKPD terkait kepada penyusun LPPD terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan data tersebut menjadi kurang sesuai. Sehingga penyusun

LPPD Kabupaten selaku admin melakukan penundaan dalam proses pengentrian data pada narasi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran untuk Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi terkait Penerapan SIM LPPD, yaitu sebagai berikut.

1. Lebih fokus kembali dalam merancang Sistem Informasi Manajemen dengan lebih menekankan keandalan informasi dan ketepatan dalam pengentrian data. Sehingga porsi informasi yang disajikan akan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada LPPD dan sesuai dengan kebutuhan pada tingkatan Manajemen baik *Top Management, Midle Management, dan Low anagement*.
2. Memanfaatkan sosial media untuk proses interaksi dengan menggunakan akun resmi LPPD Kabupaten Banyuwangi. Bentuk aplikasinya dapat dilakukan secara terbuka dalam berbentuk forum maupun dapat dilakukan *private chatting* antar penyusun yang terintegrasi secara *online* dengan aplikasi SIM LPPD, dimana dalam interaksi ini tidak tertutup hanya untuk penyusun LPPD namun juga terbuka untuk kepala SKPD yang bertujuan untuk ikut serta dalam rangka proses pemantauan pelaksanaan LPPD secara interaktif melalui pesan.
3. Perlu dibuat sebuah peraturan yang sebagai penegasan terkait kewajiban bagi seluruh SKPD dalam penyusunan LPPD pada SIM LPPD, dimana diharapkan pada peraturan ini akan berisi mengenai aturan pelaksanaan SIM LPPD seperti pembagian tugas pada tiap fungsi dalam penyusunan LPPD dan sanksi administratif terhadap SKPD yang tidak melaksanakan atau terlambat dalam penyusunan LPPD dalam SIM LPPD. Apabila terdapat sanksi administratif yang jelas maka bisa dipastikan jajaran pada SKPD pasti akan menjadikan LPPD sebagai salah satu kegiatan yang mejadi perhatian serius.
4. Membangun jaringan *internet* yang lebih luas guna menampung lonjakan *user*, sehingga pada saat digunakan bersamaan tidak terjadi masalah dalam mengakses aplikasi SIM LPPD.

5. Tampilan informasi yang disampaikan kepada tiap *level management* juga harus lebih menarik dengan diberikan data tabel dan grafik yang menginformasikan peringkat SKPD yang telat dalam pengentrian suplemen data, sehingga penyusun LPPD di SKPD dapat terpantau secara luas melalui data dalam bentuk grafik.
6. Mengorganisasikan kembali penyusun LPPD di SKPD untuk melakukan pengumpulan data terkait narasi dan dilakukan sosialisasi lanjutan serta komunikasi secara intens bahwasannya dalam pengentrian menu narasi merupakan bentuk koordinasi antara penyusun LPPD Kabupaten dengan penyusun LPPD di SKPD sehingga tampil informasi pada narasi sebagai bahan referensi dalam penyusunan LPPD.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Bungin, Burhan. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Buku Manual Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indeks Kinerja Kunci (SIM LPPD IKK) 2012
- Gadjong, Agussalim A. 2007. *Pemerintahan Daerah (kajian politik dan hukum)*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Kumorotomo, W dan Margono, S.A. 2009. *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Sektor Publik*. Yogyakarta: FISIPOL – Gajah Mada University Press.
- Marbun, B.N. (2005). *Otonomi Daerah 1945-2005 : Proses dan Realita*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Eko. 2008. *Sistem Informasi Manajemen Konsep, Aplikasi, dan perkembangan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Nurcholis, Hanif, & Amin, Zainul Ittihad. 2010. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- O'Brien, James A. dan George M. Marakas. 2010. *Management Information Systems. Eight Edition*. New York : McGraw-Hill/Irwin.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember 2012
- Ridwan, Juniarso, Sudrjat, Achmad S. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa
- Syaukani et al. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Santosa, Pandji. 2008. *Adiministrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT Refika Aditama
- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. 2004. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta. Kencana

Wibawa, Samodra. 2005. *Reformasi Administrasi Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*. Yogyakarta : Gava Media

Perundang-Undangan

Kepmendagri No. 120-276 Tahun 2011 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Daerah terhadap LPPD

Kepmendagri No. 100-279 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Daerah terhadap LPPD

Kepmendagri No. 120-2818 Tahun 2013 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Daerah terhadap LPPD

Kepmendagri No. 120-251 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Daerah terhadap LPPD

Kepmendagri No. 100-279 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Daerah tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat

Peraturan Bupati Banyuwangi No 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi

Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/126/KEP/429.012/2007 tentang Penggunaan Nama Domain Situs Web Resmi Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Internet

<http://portal.banyuwangikab.go.id/lppd/depan.php>

LAMPIRAN

Lampiran A. PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi

a. Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD)

- 1) Apa saja informasi yang terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disampaikan pada SIM LPPD?
- 2) Kepada siapa saja dan bagaimana bentuk penyajiannya?
- 3) Sejak kapan penerapan Sistem Informasi Manajemen Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diterapkan?
- 4) Apa dasar atau landasan hukumnya?

b. Komponen sistem Informasi

Komponen Interaksi, Komponen Prosedur dan Metode Kerja, Komponen Database, Komponen Informasi saja?

- 1) Seperti apa bentuk aplikasinya?
- 2) Apa kegunaannya ?
- 3) Siapa saja penggunanya?
- 4) Siapa administrator atau pengelolanya?
- 5) Komponen apa saja yang tersedia dalam pelaksanaan SIM LPPD dan bagaimana sistem kerja antar komponen tersebut?
- 6) Bagaimana alur pengelolaan data hingga menjadi informasi yang ditampilkan dalam SIM LPPD?
- 7) Apa saja kendalanya?

Lampiran B. DOKUMENTASI FOTO

B.1 Kantor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi



B.2 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum, Bapak Abdur Rachman



- B.3 Wawancara dengan penyusun LPPD Kabupaten Banyuwangi yang juga sekaligus Admin SIM LPPD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Prima Kharisma Jabara



- B.4 Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Kabupaten Banyuwangi



- B.5 Wawancara dengan Penyusun LPPD Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi, ibu Evy Aria Lestari, yang ditemani oleh sekretaris BKD Kabupaten Banyuwangi yaitu bapak Akhmad Jamhur.



- B.6 Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi



B.7 Wawancara dengan Penyusun LPPD Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Tjatur Hidayat Nugroho.



B.8 Wawancara dengan Pegawai PNS non Struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, Ibu Siti Nurjanah



B.9 Wawancara dengan Petani pada Kecamatan Rogojampi, Bapak Sodikin.



Lampiran C. DOKUMEN

